



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

LKjIP TAHUN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan amanat dalam peraturan tersebut di atas, LKjIP Kota Balikpapan tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja Kota Balikpapan 2016 yang diukur berdasarkan target indikator kinerja yang bermuara pada capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan atas penggalan RPJMD Kota Balikpapan 2016 yang bermuara pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Wali Kota Balikpapan tahun 2016.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, Wali Kota Balikpapan menetapkan 14 sasaran dan 20 indikator kinerja (IKU) berikut targetnya. Pencapaian sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh 81 program prioritas dan program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah lingkup Kota Balikpapan tahun 2016.

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran terhadap indikator kinerja (IKU) Kota Balikpapan tahun 2016 per sasaran strategisnya, maka capaian sasaran strategis (sasaran kinerja) Kota Balikpapan tahun 2016 dinyatakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Kualitas/Mutu Pendidikan" yang ditentukan berdasarkan rata-rata hasil pengukuran 2 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
2. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja) dinyatakan TERCAPAI.
3. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
4. Capaian untuk Sasaran "Kondusifitas di Daerah dengan Mensinergikan Peran-peran Masyarakat dan Pemerintahan dalam Pembangunan" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
5. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Pertanian dalam Arti Luas" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
6. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Kekuatan Perekonomian pada Umumnya dan Kesejahteraan Masyarakat yang ditentukan berdasarkan rata-rata hasil pengukuran 4 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
7. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.

8. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
9. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persediaan Daya Listrik kepada Masyarakat" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
10. Capaian untuk Sasaran "Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Lingkungan" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
11. Capaian untuk Sasaran "Terlaksananya Reformasi Birokrasi" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TERCAPAI.
12. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah" yang ditentukan berdasarkan rata-rata hasil pengukuran 2 indikator kinerja dinyatakan TIDAK TERCAPAI.
13. Capaian untuk Sasaran "Terwujudnya Infrastruktur Dasar" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TIDAK TERCAPAI.
14. Capaian untuk Sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran 1 indikator kinerja dinyatakan TIDAK TERCAPAI.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan tahun 2016. LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 menyajikan gambaran informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Walikota Balikpapan tahun 2016, sekaligus pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016.

LKjIP tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016. Pedoman penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (*stakeholder*) yang berwenang untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LANDASAN HUKUM.....	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
C. DATA ORGANISASI.....	10
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
B. REALISASI ANGGARAN.....	67
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	70
BAB IV PENUTUP.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan	19
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2016	21
Tabel 2.3.	Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2016	22
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016.....	29
Tabel 3.2.	Perbandingan Target Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Tahun 2015.	44
Tabel 3.3.	Rasio dan Capaian Rata-Rata IKU Terhadap Target RPJMD Tahun 2011-2016 Kota Balikpapan	55
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016	67
Tabel 3.5	Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016	68
Tabel 3.6	Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016	68
Tabel 3.7	Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Tahun 2011-2016.....	69
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016	69
Tabel 3.9	Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun 2011-2016	69
Tabel 3.10.	Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan	70
	Tahun 2016	
Tabel 4.1.	Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2016	76
	Tahun 2016	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Melek Huruf Tahun 2016	31
Gambar 3.2.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016.....	32
Gambar 3.3.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Pengangguran Tahun 2016	33
Gambar 3.4.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Usia Harapan hidup Tahun 2016.....	33
Gambar 3.5.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penurunan Konflik Tahun 2016	34
Gambar 3.6.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Kontribusi Sektor Pertanian Tahun 2016.....	35
Gambar 3.7.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Pendapatan Perkapita Tahun 2016.....	36
Gambar 3.8.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Inflasi Tahun 2016.....	36
Gambar 3.9.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Presentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2016	37
Gambar 3.10.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2016.....	38
Gambar 3.11.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2016	38
Gambar 3.12.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini BPK Tahun 2016.....	39
Gambar 3.13.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai LPPD Tahun 2016.....	40
Gambar 3.14.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016	41
Gambar 3.15.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016	42
Gambar 3.16.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Skor Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016	43
Gambar 3.17.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan Tahun 2016	44
Gambar 3.18.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2016.....	46
Gambar 3.19.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016	47
Gambar 3.20.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota Tahun 2016.....	48

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Walikota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian, LKjIP ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan tahun 2016, yang merupakan tahun terakhir RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2016.

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2015 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010–2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Kota Balikpapan tahun 2016 adalah kurang lebih sama dengan LKjIP tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan tahun-tahun berikutnya.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 terhadap target sasaran RPJMD tahun 2016 ;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 dan ;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012-2016 (5 tahun) dengan target kinerja 2012-2016 (5 tahun) yang direncanakan (RPJMD Kota Balikpapan).

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP) tersebut adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. DATA ORGANISASI

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan sampai akhir tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah. Peraturan tersebut mengatur organisasi perangkat daerah Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Adapun organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Tata Kota dan Perumahan;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - 9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 10) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - 11) Dinas Pendapatan Daerah;
 - 12) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 13) Dinas Pasar.
- k. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas B;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan
- p. Kecamatan :
- 1) Kecamatan Balikpapan Barat;
 - 2) Kecamatan Balikpapan Utara;
 - 3) Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - 4) Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - 5) Kecamatan Balikpapan Timur;
 - 6) Kecamatan Balikpapan Kota.
- q. Kelurahan :
- 1) Kelurahan Baru Ilir;
 - 2) Kelurahan Baru Ulu;
 - 3) Kelurahan Baru Tengah;
 - 4) Kelurahan Kariangau;
 - 5) Kelurahan Margo Mulyo;
 - 6) Kelurahan Marga Sari;
 - 7) Kelurahan Batu Ampar;
 - 8) Kelurahan Gunung Samarinda;
 - 9) Kelurahan Karang Joang;
 - 10) Kelurahan Muara Rapak;
 - 11) Kelurahan Gunung Sari Ulu;
 - 12) Kelurahan Gunung Sari Ilir;
 - 13) Kelurahan Karang Jati;
 - 14) Kelurahan Sumber Rejo;
 - 15) Kelurahan Karang Rejo;
 - 16) Kelurahan Mekar Sari;
 - 17) Kelurahan Sepinggan;
 - 18) Kelurahan Gunung Bahagia;
 - 19) Kelurahan Damai;
 - 20) Kelurahan Klandasan Ulu;

- 21) Kelurahan Klandasan Ilir;
- 22) Kelurahan Prapatan;
- 23) Kelurahan Telaga Sari;
- 24) Kelurahan Teritip;
- 25) Kelurahan Lamaru;
- 26) Kelurahan Manggar;
- 27) Kelurahan Manggar Baru;
- 28) Kelurahan Sungai Nangka;
- 29) Kelurahan Sepinggian Baru;
- 30) Kelurahan Damai Baru;
- 31) Kelurahan Damai Bahagia;
- 32) Kelurahan Graha Indah;
- 33) Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
- 34) Kelurahan Sepinggian Raya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan tahun 2016, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016;
2. Membandingkan antara realisasi / capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015;
3. Membandingkan realisasi kinerja 2011-2016 dengan target jangka menengah (5 tahun) yang terdapat dalam dokumen RPJMD periode 2011-2016;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar

nasional (yang ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keputusan Walikota Tentang Indikator Kinerja Utama
4. Hasil Reviu Inspektorat Kota Balikpapan Terhadap LKjIP tahun 2016
5. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 2005 – 2025.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011–2016 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* kunci. Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tahun 2016 merupakan tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2011-2016 serta merupakan tahun ketiga kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2016.

1. Visi Dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2011-2016 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI
MENUJU MADINATUL IMAN

Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

- a. Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

- b. **Madinatul Iman**, mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Beriman;
- b. Membangun Kewirausahaan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
- c. Meningkatkan Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Pemberantasan KKN dan Penanganan Masalah Sosial;
- d. Meningkatkan Investasi, Memperkokoh Ekspektasi Dunia Usaha dan Memperluas Lapangan Kerja;
- e. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- f. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif;
- g. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- h. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Mengembangkan Pariwisata serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotongroyongan.

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2011-2016, sebagai berikut :

MISI 1	
Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Beriman	
Tujuan Ke-1	: Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan ; 2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan ; 3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
Tujuan Ke-2	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran	: 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat ; 2. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
Tujuan Ke-3	: Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.
Sasaran	: 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan ; 2. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga.
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.
Sasaran	: 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama ; 2. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

MISI 2	
Membangun Kewirausahaan Dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	
Tujuan Ke-1	: Mengembangkan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi.
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi ; 2. Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi.
Tujuan Ke-2	: Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat.
Sasaran	: 1. Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

MISI 3	
Meningkatkan Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Pemberantasan KKN dan Penanganan Masalah Sosial	
Tujuan Ke-1	: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
Sasaran	: 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
Tujuan Ke-2	: Meningkatkan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN.
Sasaran	: 1. Meningkatnya partisipasi politik Masyarakat.
Tujuan Ke-3	: Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sasaran	: 1. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

	2. Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana.
Sasaran	: 1. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana ; 2. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

MISI 4

Meningkatkan Investasi, Memnuhi Ekspektasi Dunia Usaha, dan Memperluas Lapangan Kerja

Tujuan Ke-1	: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif.
Sasaran	: 1. Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi.
Tujuan Ke-2	: Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.
Sasaran	: 1. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
Tujuan Ke-3	: Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
Sasaran	: 1. Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja.
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.
Sasaran	: 1. Meningkatnya sumber sumber pendapatan daerah;

MISI 5

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Tujuan Ke-1	: Meningkatkan pelayanan publik yang prima
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik;
Tujuan Ke-2	: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan.
Sasaran	: 1. Terlaksananya reformasi birokrasi

MISI 6

Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif

Tujuan Ke-1	: Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan
Sasaran	: 1. Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan ; 2. Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
Tujuan Ke-2	: Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.
Sasaran	: 1. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum ; 2. Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengelolaan air

	limbah (IPAL) terpadu.
Tujuan Ke-3	: Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota
Sasaran	: 1. Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan
Tujuan Ke-4	: Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh ; 2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ; 3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan Ke-5	: Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Sasaran	: 1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 2. Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil ; 3. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

MISI 7

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Serta Perlindungan Anak

Tujuan Ke-1	: Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Sasaran	: 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
Tujuan Ke-2	: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran	: 1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
Tujuan Ke-3	: Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
Sasaran	: 1. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja ;
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas anak.

MISI 8

Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup Dan Mengembangkan Pariwisata Serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotong Royongan

Tujuan Ke-1	: Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)
Sasaran	: 1. Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS; 2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota ;

	3. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat.
Tujuan Ke-2	: Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya
Sasaran	: 1. Meningkatnya upaya pelestarian ragam seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan.
Tujuan Ke-3	: Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 2. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011-2016, maka perlu disusun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2011-2016.

Sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan IKU Kota Balikpapan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-105/Org/2015 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Angka Melek Huruf (%) 2. Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	3. Tingkat pengangguran (%)	Dinas Nakersos
3.	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	4. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan
4.	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	5. Penurunan Konflik (%)	Kantor Kesbangpol
5.	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Rp)	Dinas Pertanian KP
6.	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	7. Pendapatan per kapita (Rp) 8. PAD (Rp) 9. Inflasi (%) 10. Pertumbuhan ekonomi (%)	Bappeda, Bagian Perekonomian, Dispenda

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
7.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	11. Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial (%)	Disnakersos
8.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pelayanan publik	12. Skor Survei Kepuasan Masyarakat (Skor)	Bagian Organisasi
9.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	13. Rasio Ketersediaan daya listrik (Kilowatt)	Bagian Perekonomian
10.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	14. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)	Bappeda, BPMP2T, Disperindagkop
11.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	15. Opini BPK (Kategori)	BPKAD, Inspektorat, Bappeda
12.	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori) 17. Nilai LPPD (Skor)	Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
13.	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	18. Presentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	Dinas PU, Bappeda
14.	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Skor) 20. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota (Skor)	BLH Bagian Organisasi, DKPP

B. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2016 antara Walikota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transpa-ransi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/-kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 ini memuat informasi tentang sasaran strategis, di mana setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Penetapan target IKU tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Angka Melek Huruf (%)	98,68
		2. Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,41
2.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	3. Tingkat pengangguran (%)	8,71
3.	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	4. Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,94
4.	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	5. Penurunan Konflik (%)	0
5.	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Rp.)	550.000
6.	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	7. Pendapatan per kapita (Rp)	67.844.528
		8. PAD (Rp)	593.881.591.699
		9. Inflasi (%)	7,92
		10. Pertumbuhan ekonomi (%)	7,46
7.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	11. Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial (%)	85
8.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pelayanan publik	12. Skor Survei Kepuasan Masyarakat (Skor)	85

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	13. Rasio Ketersediaan daya listrik (Kilowatt)	90
10.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	14. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp.)	39.481.688
11.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	15. Opini BPK (Kategori)	WTP
12.	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)	BB
		17. Nilai LPPD (Skor)	10 (Besar)
13.	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	18. Presentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	90
14.	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Skor)	63,95
		20. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota (Skor)	85

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut di atas, target capaian IKU akan didukung oleh Salinan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB tahun 2016 disajikan dalam lampiran LKjIP ini.

Tabel 2.3. Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2016

NO	PROGRAM	PAGU DANA
1	Program Pengembangan Tenaga Kependidikan	Rp 281.000.000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 49.472.689.600
3	Program Pendidikan Menengah	Rp 35.620.992.000
4	Program Pendidikan Non Formal	Rp 10.271.990.400
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 10.205.414.650
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Rp 1.000.000.000
7	Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Rp 2.284.440.000
8	Program BOS(Kota)Wajib Belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SD)	Rp 38.049.818.750

NO	PROGRAM		PAGU DANA
9	Program BOS(Kota)Wajib Belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SMP)	Rp	18.980.786.500
10	Program BOSDA Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp	20.659.250.500
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	10.331.570.000
12	Program peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.267.415.000
13	Program peningkatan kesempatan kerja	Rp	2.620.010.000
14	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	1.173.600.000
15	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp	3.563.495.000
16	Program pendidikan politik masyarakat	Rp	3.815.000.000
17	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp	93.750.000
18	Program peningkatan produksi perkebunan	Rp	2.478.994.450
19	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Rp	1.467.465.000
20	Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Rp	470.023.000
21	Program peningkatan produksi pertanian	Rp	1.729.185.000
22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp	109.135.000
23	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp	290.800.000
24	Usaha pengembangan potensi BUMD dan Ekonomi Kerakyatan	Rp	284.330.000
25	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	2.620.010.000
26	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Rp	396.231.000
27	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Rp	423.149.600
28	Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rp	1.119.107.000
29	Program penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp	78.513.837.750
30	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp	3.035.000.000
31	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp	630.000.000
32	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	1.679.100.000
33	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	5.544.820.250
34	Program peningkatan pengendalian polusi	Rp	565.417.000
35	Program pengelolaan kawasan konservasi/hutan kota	Rp	8.061.082.200
36	Program peningkatan kesehatan dan lingkungan hidup	Rp	432.844.900
37	Program penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp	432.844.900

NO	PROGRAM	PAGU DANA
38	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp 3.035.000.000
39	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp 630.000.000
40	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp 1.679.100.000
41	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 5.544.820.250
42	Program peningkatan pengendalian polusi	Rp 565.417.000
43	Program pengelolaan kawasan konservasi/hutan kota	Rp 8.061.082.200
44	Program peningkatan Kesehatan dan lingkungan Hidup	Rp 432.844.900
45	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp 432.844.900
46	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 10.600.000.000
47	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 19.127.574.050
48	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 423.100.000
49	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.230.000.000
50	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Rp 2.230.000.000
51	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 1.208.900.000
52	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 4.591.310.000
53	Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rp 600.500.000
54	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp 1.478.900.000
55	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 12.810.290.900
56	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp 5.697.550.200
57	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp 544.620.000
58	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp 5.214.500.000
59	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rp 2.669.620.000
60	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Rp 10.445.593.000
61	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp 13.083.803.000
62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 127.182.778.484
63	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rp 1.800.000.000
64	Program Pengendalian Banjir	Rp 80.198.786.750
65	Program Sumber Daya Manusia	Rp 3.694.004.160
66	Program Penelitian	Rp 6.686.000.000
67	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Rp 603.832.732.392
68	Program Pembangunan Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 114.537.020.020

NO	PROGRAM		PAGU DANA
69	Program Operasional Pemeliharaan Ke-PU-an	Rp	11.482.202.500
70	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	200.000.000
71	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	538.050.000
72	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp	500.000.000
73	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	180.000.000
74	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	1.530.000.000
75	Program Peningkatan Pelayanan Laut	Rp	659.727.000
76	Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan	Rp	328.970.000
77	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota	Rp	1.038.970.000
78	Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	3.337.800.000
79	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	1.577.209.520
80	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan	Rp	79.000.000
81	Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	90.000.000
JUMLAH		Rp	1.392.785.220.676

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah memenuhi tuntutan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011-2016 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Laporan LKjIP Tahun 2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2015 yang direviu tahun 2016 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 60,85 (BB). Hasil Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada

hasil di Pemerintah Kota Balikpapan sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Terkait atas hasil evaluasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja utama, mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari level kota sampai ke individu pegawai;
- b. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada butir 1 diatas. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
- c. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun berikutnya. Selain itu perlu memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan output tetapi juga mengasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan;
- d. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- e. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melalui pemanfaatan hasil penilaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*.
- f. Agar selalu melakukan inovasi dalam mewujudkan integrasi sistem perencanaan kinerja, sistem pengelolaan keuangan dan sistem manajemen kinerja. Sistem akan mempermudah memonitor secara aktual perkembangan pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran, sehingga diketahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya.

Berdasarkan rekomendasi di atas, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Balikpapan sebagai tindak lanjut antara lain :

- a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD periode 2016-2021 sudah diperbaiki dan disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- b. Penyusunan indikator kinerja utama pada perangkat daerah sudah dilakukan secara berjenjang dan diselaraskan sesuai IKU Walikota, Esselon II, Esselon III sampai Esselon IV.
- c. Penajaman terhadap indikator kinerja berbasis *outcome* (hasil) pada perangkat daerah telah dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan-tahapan perencanaan (penyusunan RENSTRA dan RENJA).
- d. Hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Balikpapan, Inspektorat Provinsi Kalimantan timur dan Menteri PANRB telah digunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan penyusunan laporannya.

- e. reward and punishment akan diusulkan kepada Wali Kota Balikpapan bagi Perangkat daerah yang dinilai memiliki prestasi dalam perbaikan budaya kerja dan kualitas pelaporan kerjanya.
- f. Pemerintah Kota Balikpapan telah membuat berbagai inovasi dalam meningkatkan kerjanya antara lain : Integrasi Sistem Perencanaan, Pendapatan dan Evaluasi, Sistem Kendali Capaian Kinerja Secara Berkala, Sistem informasi Data Spasial (SITAS) dan lain-lain.

2. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 22, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terkait dengan Laporan Kinerja tahunan yang berisikan hasil dari capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun berjalan haruslah berorientasi terhadap hasil, relevan dan terukur.

Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 pasal 22 tersebut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, sebagaimana lampiran II mendeskripsikan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 bertujuan untuk memperoleh : 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29/2014 dan Permen PANRB No. 53/2014, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada 2016 sebagai akhir periode akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 didasarkan atas 3 pengukuran yaitu : 1) Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 berdasarkan perbandingan target dan realisasi Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2016; 2) Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian tahun 2015 dan realisasi capaian tahun 2016; dan 3) Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 terhadap Capaian Target Akhir Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2011-2016 Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Wali Kota Balikpapan yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2016.

Target yang diperjanjikan pada tahun 2016 terdiri atas 14 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tergambar pada Bab II Laporan ini. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas 14 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal yang berkewenangan dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 untuk 14 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian IKU
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1	Angka Melek Huruf (%)	98,68	99,44	100,77
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,41	10,59	101,,75
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	3	Tingkat pengangguran (%)	8,17	5,45	149,91
3	Meningkatnya Status kesebatan masyarakat	4	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,94	73,96	100,03
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pernbangunan	5	Penurunan Konflik (%)	0.00	0.00	100,00
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Rp)	550.000.00	707293.78	128,60

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian IKU
6	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	7	Pendapatan Perkapita (Rp)	67.844.528	130.488.362,89	192,33
		8	PAD (Rp)	593.881.591,699	560,364,263,457	94,36
		9	Inflasi (%)	7,92	4.13	191,77
		10	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,46	1.56	20,91
7	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	11	Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial (%)	85,00	96.57	113,61
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan layanan publik	12	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (Skor)	85,00	72.00	84,71
9	Meningkatnya cakupan layanan penyediaan listrik kepada masyarakat	13	Rasio Ketersediaan daya listrik (Kilowatt)	435,50	435.50	100,00
10	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	14	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)	39.481.688	40797639.04	103,33
11	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	15	Opini BPK (Kategori)	WTP	WTP	100,00
12	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	16	Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (Kategori)	BB	60.85	84,51
		17	Nilai LPPD (Skor)	10 Besar	3.3993	109,92
13	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	18	Panjang jalan dalam Kondisi Baik (%)	90,00	83,29	92,54
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	63.95	62,45	97,65

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian IKU
	Hidup	20	Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota (Skor)	85.00	69,38	81,62

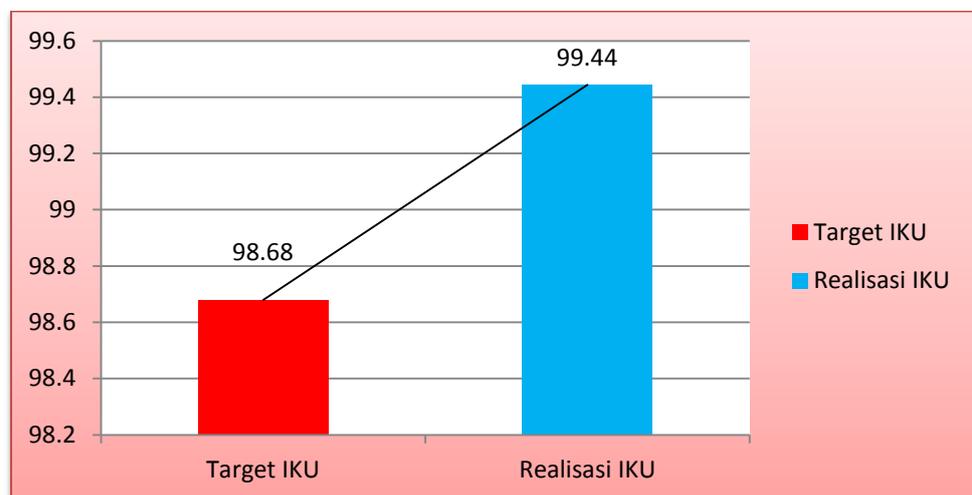
Sumber : Hasil Pengolahan Data Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.1. dari 20 IKU yang diukur capaian kinerjanya terdapat 13 (dua belas) IKU yang tercapai atau 65% IKU yang diperjanjikan memenuhi/melebihi dari target yang ditetapkan dan 7 IKU yang tidak tercapai atau 35% IKU yang diperjanjikan kurang dari target yang ditetapkan.

Adapun IKU yang sudah tercapai seperti dimaksud pada tabel diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Angka Melek Huruf

Target IKU Angka Melek Huruf sebesar 98,68% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 99,44%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 100,77% artinya capaian sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas/mutu pendidikan di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini



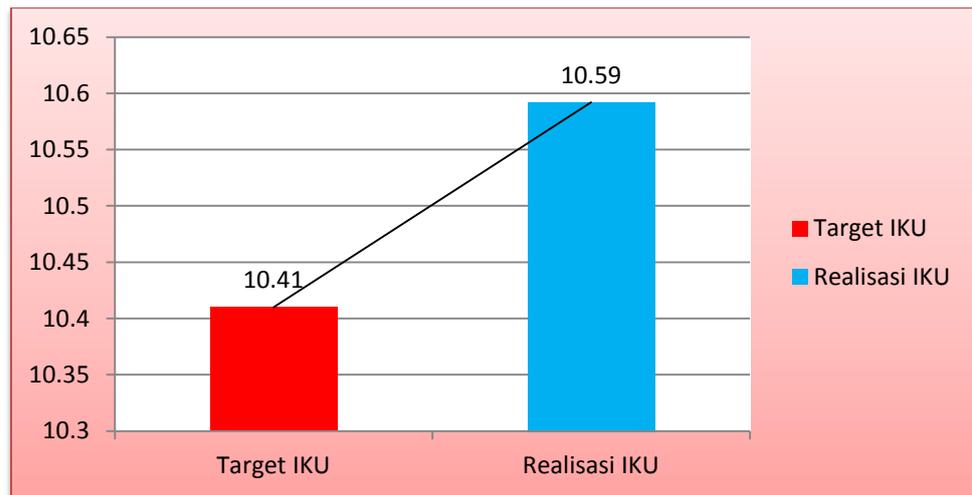
Gambar 3.1

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Melek Huruf Tahun 2016

Ketercapaian IKU Angka Melek Huruf sebesar 99,44% merupakan keberhasilan pemerintah kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Target IKU Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,41 Tahun sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 10,59 Tahun. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 101,75% artinya capaian Sasaran Strategis untuk meningkatkan kualitas/mutu pendidikan di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



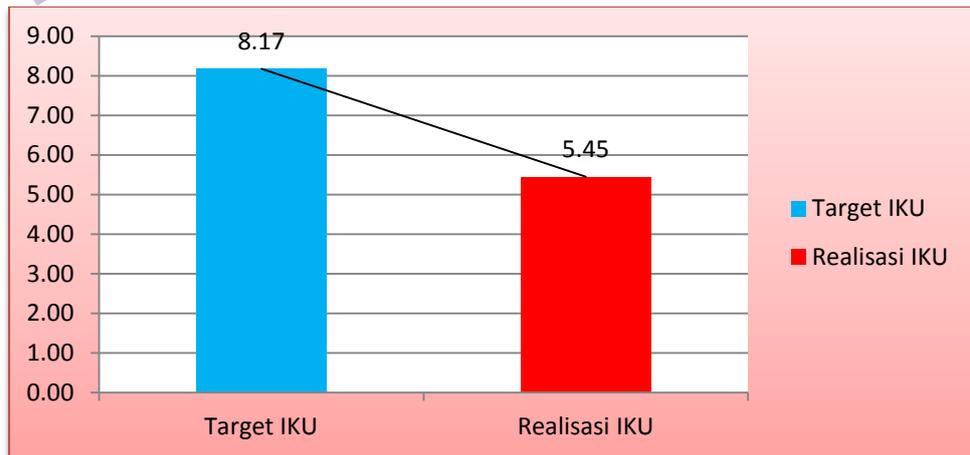
Gambar 3.2

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016

Ketercapaian IKU Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,59 Tahun merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi S2/S3.

3. Tingkat Pengangguran

Target IKU Tingkat Pengangguran sebesar 8,17% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 5,45%. Berdasarkan capaian realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran sebesar 149.91% artinya capaian Sasaran Strategis untuk meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



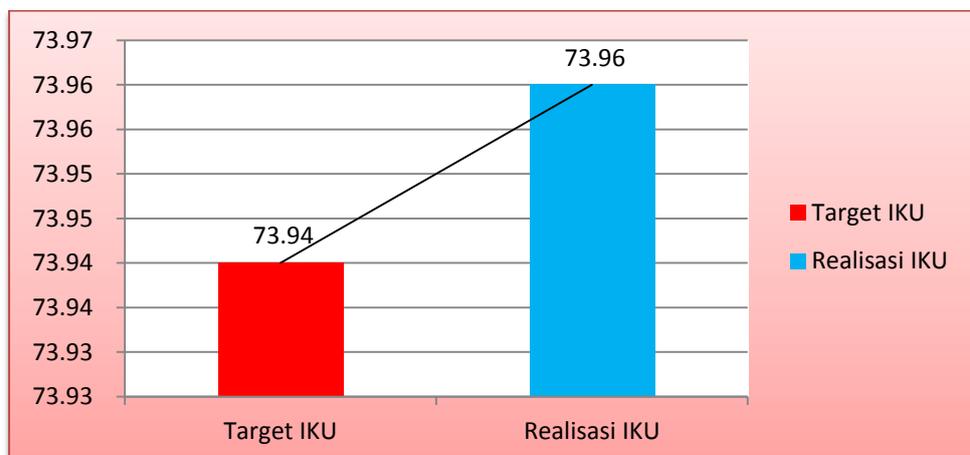
Gambar 3.3

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Pengangguran Tahun 2016

Ketercapaian IKU Tingkat Pengangguran sebesar 5,45% merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam membangun lapangan usaha melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia (masyarakat Kota Balikpapan) melalui bimbingan teknis dan pelatihan ketrampilan/ keahlian serta mengembangkan kemitraan pada sejumlah perusahaan di Kota Balikpapan dalam penyediaan lapangan kerja bagi pencari kerja (pengangguran).

4. Usia Harapan hidup

Target IKU Usia Harapan hidup sebesar 73,94 Tahun, sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 73,96 Tahun. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian kinerja IKU sebesar 100.03% artinya Sasaran Strategis untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



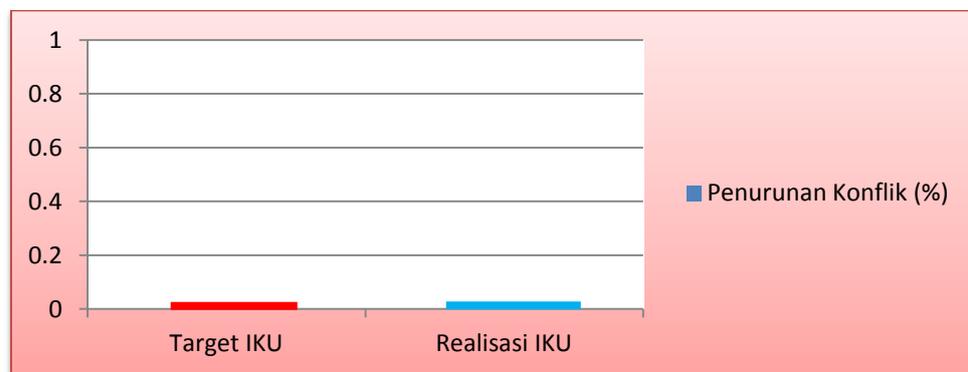
Gambar 3.4

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Usia Harapan hidup Tahun 2016

Ketercapaian IKU sebesar 73,96 Tahun merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan.

5. Penurunan Konflik

Target IKU Penurunan Konflik sebesar 0% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 0%. Berdasarkan capaian realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Penurunan Konflik sebesar 100.00% artinya capaian Sasaran Strategis untuk mewujudkan kondusifitas di daerah di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



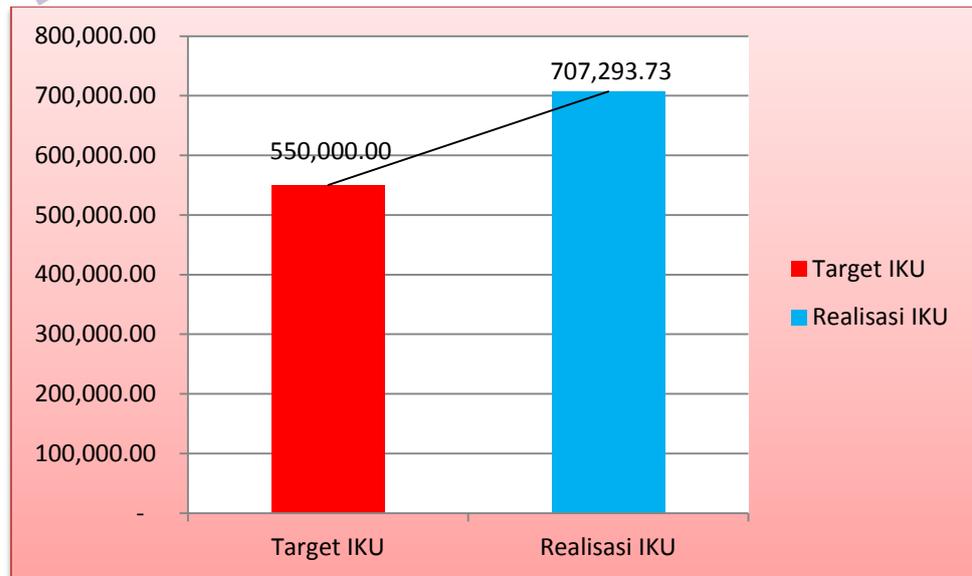
Gambar 3.5

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penurunan Konflik Tahun 2016

Ketercapaian IKU sebesar 0% merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam membangun ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Balikpapan. Ketertiban dan keamanan di Kota Balikpapan didukung atas kerja keras perangkat daerah, instansi vertikal (Kepolisian Daerah dan TNI), dan keikutsertaan kelompok masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat dalam membangun, menjaga dan memelihara kondusifitas Kota dari ancaman baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar Kota Balikpapan.

6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Target IKU Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar Rp.550.000 (dalam jutaan rupiah) sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar Rp. 707.293,73 (dalam jutaan rupiah) Berdasarkan capaian realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar 128.60% artinya capaian Sasaran Strategis untuk meningkatkan pertanian dalam arti luas di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



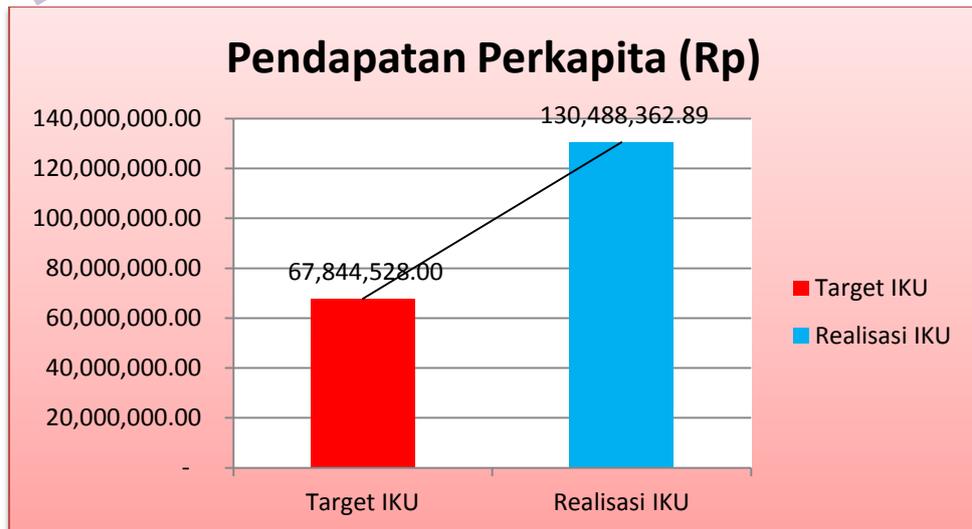
Gambar 3.6.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Kontribusi Sektor Pertanian Tahun 2016

Ketercapaian IKU sejumlah Rp.707.293,73 (dalam jutaan rupiah) merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam membangun sektor pertanian yang terukur atas ketersediaan lahan pertanian, jenis usaha pertanian, produk hasil pertanian dan pendapatan dari hasil usaha pertanian di Kota Balikpapan.

7. Pendapatan Perkapita

Target IKU Pendapatan Perkapita sebesar Rp. 67.844.528 sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar Rp. 130.488.362,89 Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 192,33% artinya sasaran strategis untuk meningkatkan kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat “TERCAPAI” pada tahun 2016, hal ini ditunjukkan atas perbandingan target dan realisasi pada grafik dibawah ini.



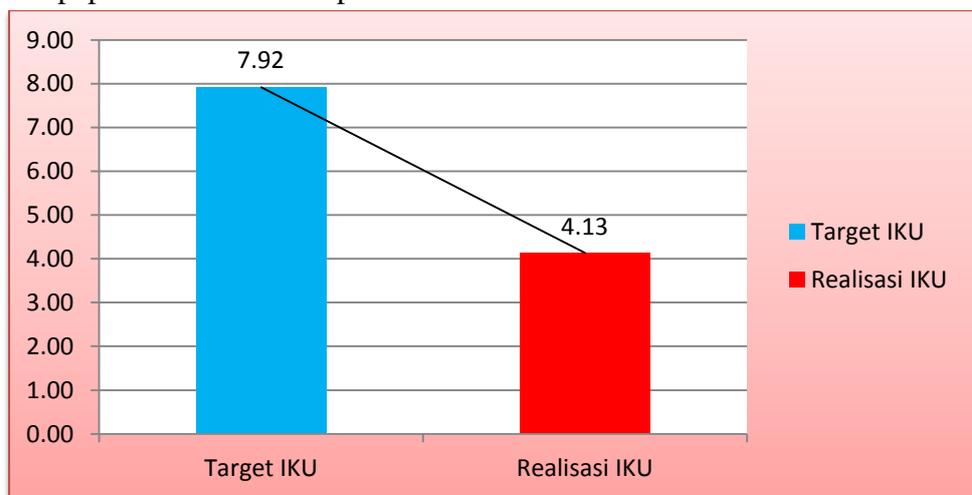
Gambar 3.7

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Pendapatan Perkapita Tahun 2016**

Ketercapaian IKU sejumlah Rp. 130.488.362.89 merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan besaran rata-rata pendapatan atau penghasilan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2016.

8. Inflasi

Target IKU Inflasi sebesar 7,92% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 4,13%. Berdasarkan realisasi tersebut menunjukkan capaian kinerja sebesar 191,77% artinya sasaran strategis untuk meningkatkan kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat memberikan pengaruh untuk pengendalian inflasi di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016.



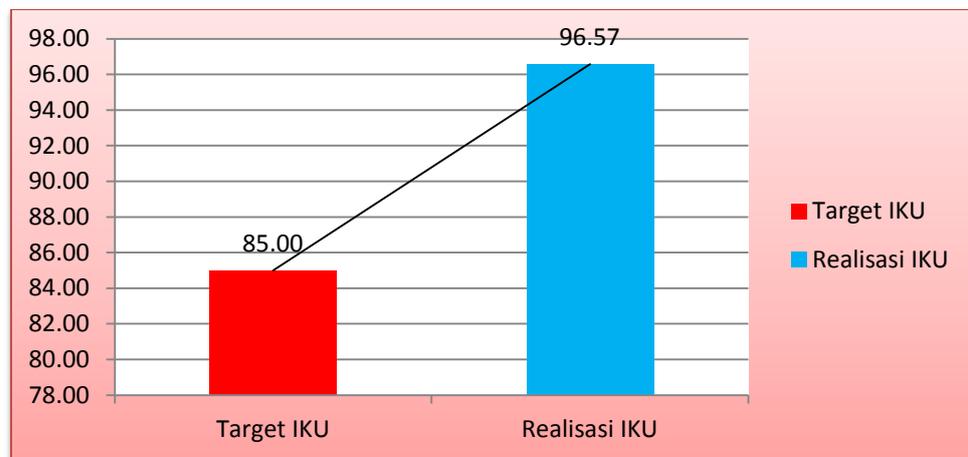
Gambar 3.8

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Inflasi Tahun 2016**

Ketercapaian IKU sebesar 4,13% (penurunan inflasi) merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam mengendalikan dan menekan inflasi di Kota Balikpapan pada tahun 2016.

9. Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial

Target IKU Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial sebesar 85% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 96,57%. Berdasarkan capaian realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 113,61% artinya sasaran strategis untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016.



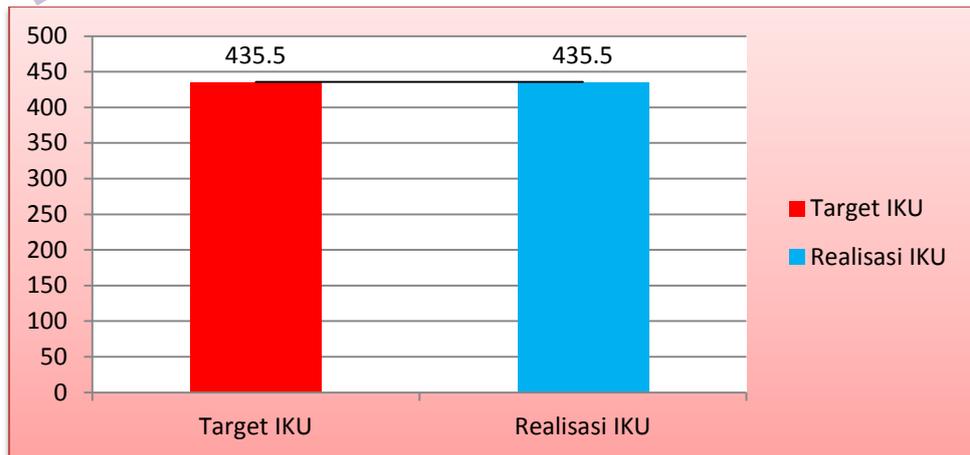
Gambar 3.9.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Presentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2016

Ketercapaian IKU sebesar 96,57% merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap 1500 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Balikpapan pada tahun 2016.

10. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Target IKU Rasio Ketersediaan daya listrik sebesar 435.5 Kilowatt sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 435.5 Kilowatt. Berdasarkan realisasi sama dengan target maka capaian kinerja Rasio Ketersediaan daya listrik mencapai 100% artinya sasaran strategis untuk meningkatkan cakupan layanan penyediaan listrik bagi masyarakat Kota Balikpapan “TERCAPAI” pada tahun 2016.



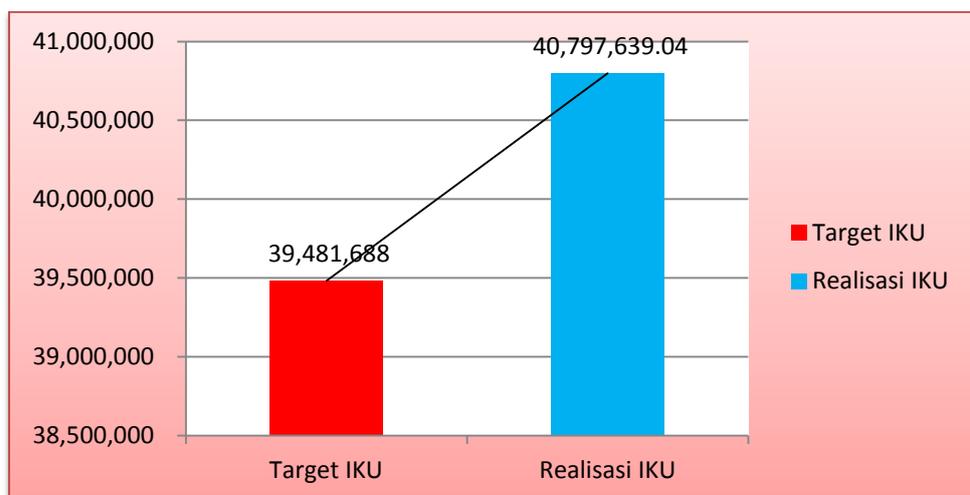
Gambar 3.10.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2016

Ketercapaian IKU tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah kota dan PT. PLN Balikpapan serta dukungan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam memfasilitasi kebutuhan cakupan layanan penyediaan listrik kepada masyarakat di Kota Balikpapan .

11. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Target IKU Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar Rp.39.481.688 (dalam jutaan rupiah) sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar Rp. 40.797.639 (dalam jutaan rupiah). Berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target maka capaian kinerja IKU tersebut sebesar 103,33% artinya sasaran strategis untuk mengembangkan kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan atas capaian kinerja IKU tersebut adalah “TERCAPAI” pada tahun 2016.



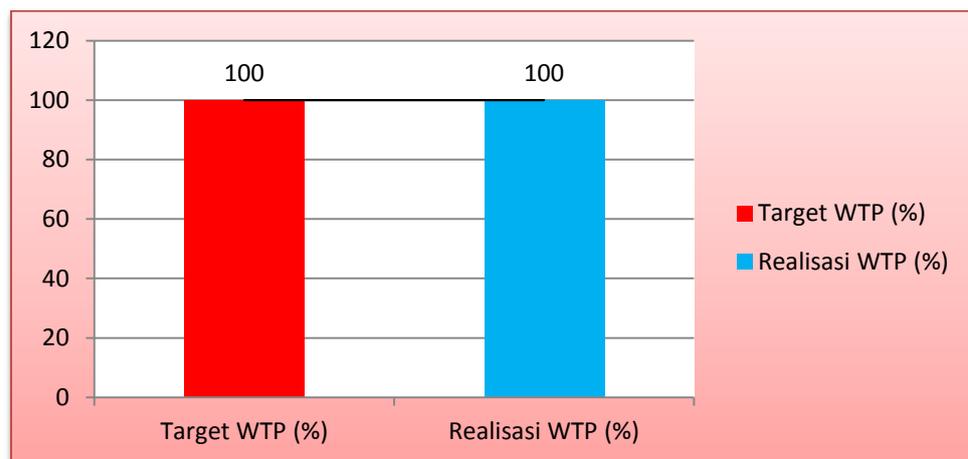
Gambar 3.11.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2016

Ketercapaian IKU sebesar Rp. 40.797.639,04 merupakan keberhasilan pemerintah kota dalam mengembangkan kawasan industri dan perdagangan sebagai daya ungkit peningkatan PDRB disektor industri.

12. Opini BPK

Target IKU Opini BPK dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi dengan kategori WTP. Berdasarkan realisasi maka capaian kinerja IKU sebesar 100% artinya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat “TERCAPAI” pada tahun 2016.



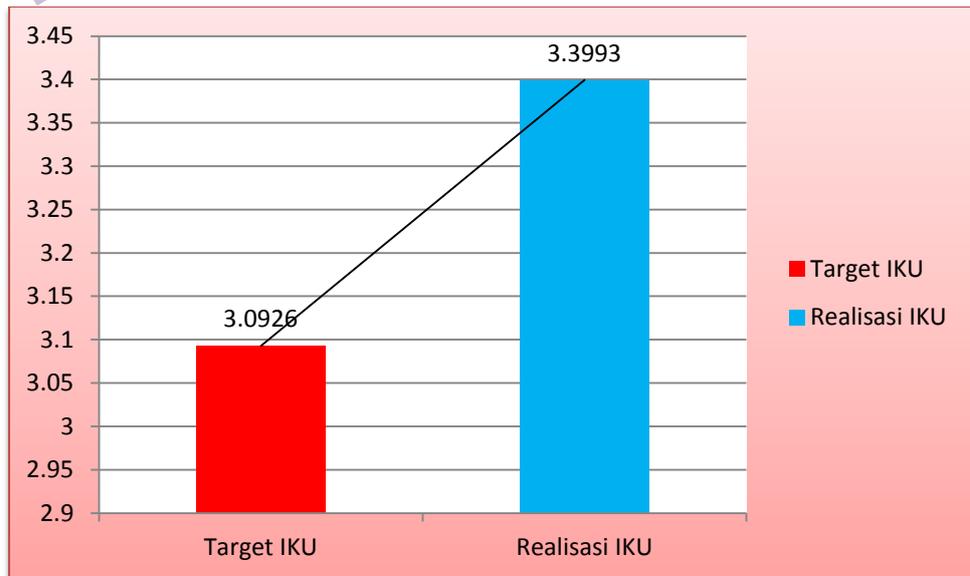
Gambar 3.12.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini BPK Tahun 2016

Ketercapaian IKU Opini BPK merupakan komitmen pemerintah kota dan instansi terkait dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, wajar, dan transparan sebagai dasar pengungkit Opini BPK dengan kategori WTP.

13. Nilai LPPD

Target IKU Nilai LPPD dengan skor 3.0926 sampai dengan tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 3.3993. Berdasarkan realisasi maka capaian kinerja IKU sebesar 109,92% artinya sasaran strategis untuk peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) “TERCAPAI” pada tahun 2016.



Gambar 3.13.

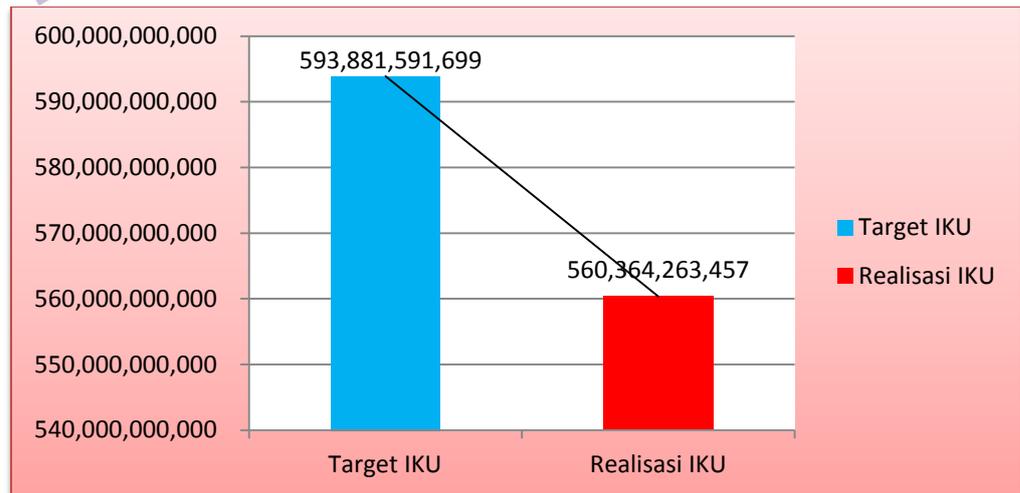
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai LPPD Tahun 2016

Ketercapaian IKU sebesar 3.3993 pada LPPD Kota Balikpapan merupakan nilai kinerja atas kerja keras pemerintah kota Balikpapan dan organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas LKjIP secara baik dalam rangka mewujudkan *good governance* secara utuh di Kota Balikpapan.

Adapun IKU yang tidak tercapai (7 indikator) berdasarkan pengolahan data Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target IKU untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.593.881.591.699 sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar Rp.560.364.263.457,29. Berdasarkan realisasi IKU capaian kinerja sebesar 94,36% artinya sasaran strategis pada IKU “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.14.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya indikator PAD pada tahun 2016 dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan daerah dari sejumlah sektor lapangan usaha di Kota Balikpapan, dikarenakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2016 merupakan efek domino dari perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. kategori yang memberikan pengaruh besar terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi PDRB tahun 2015 adalah jasa perusahaan dengan penurunan sebesar 8,14%, Informasi dan Komunikasi dengan penurunan sebesar 5,68%, dan Jasa Pendidikan dengan penurunan sebesar 8,14% serta 9 lapangan usaha yang menyumbang penurunan antara interval 0,09% - 4,83%.

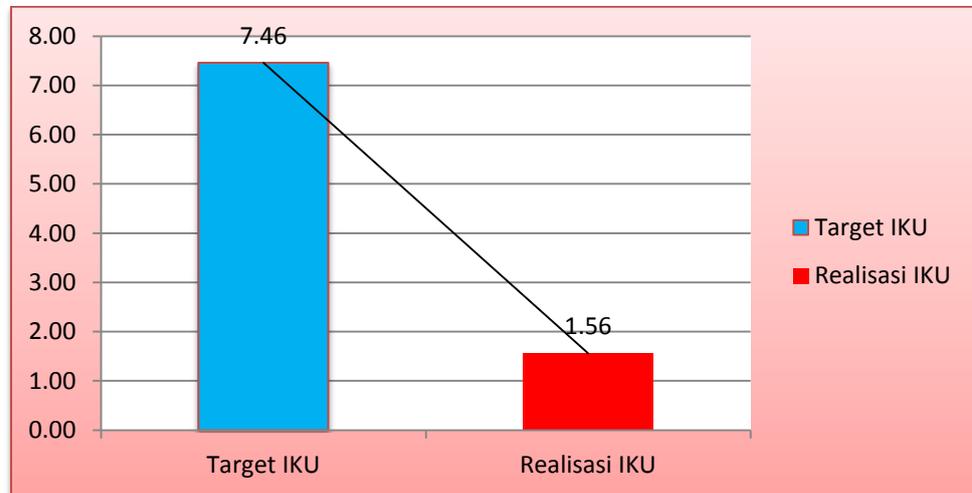
Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk peningkatan PAD antara lain :

- Intesifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pengembangan potensi sektor PAD yang belum tergarap secara optimal.
- Penerapan pemungutan PAD berbasis online sebagai efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan PAD.
- Penguatan basis data wajib pajak daerah, masih banyaknya potensi wajib pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak.
- Evaluasi piutang pajak yang tertunggak, karena pada tahun 2015-2016 terdapat wajib pajak yang menunggak.
- Peningkatan pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan inovasi pelayanan di luar hari kerja (Sabtu dan Minggu).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Target IKU Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,46% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 1,56%. Berdasarkan realisasi IKU

maka capaian kinerja IKU Pertumbuhan Ekonomi sebesar 20.91% artinya sasaran strategis pada indikator Pertumbuhan Ekonomi “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.15.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016

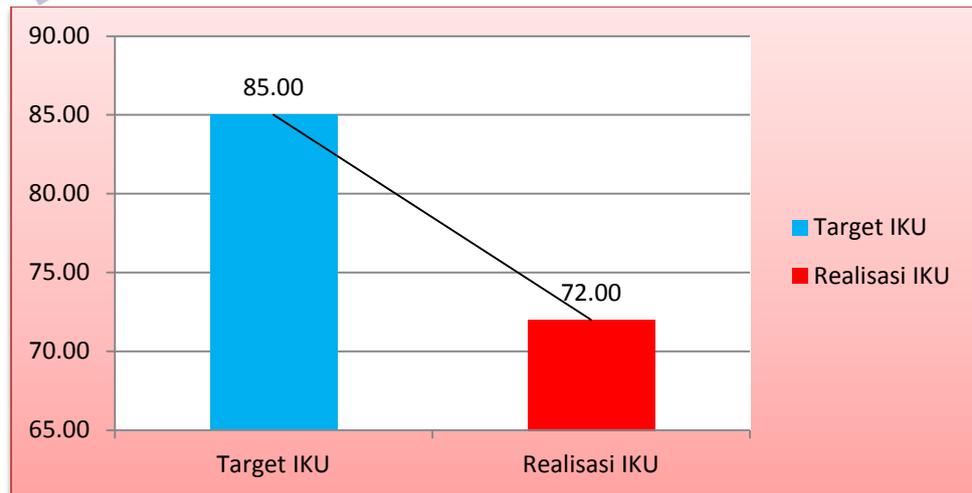
Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 dipengaruhi oleh :

- Menurunnya produksi tambang di Kalimantan Timur
- Tutupnya sejumlah perusahaan mitra kerja di bidang pertambangan
- Menurunnya kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di 17 sektor lapangan usaha.

Upaya tindak lanjut perbaikan terhadap tidak tercapainya Pertumbuhan Ekonomi adalah meningkatkan lapangan usaha sektor non pertambangan (non migas), antara lain lapangan usaha pengolahan hasil (pertanian, perikanan, perkebunan), ekonomi kreatif dan potensi UMKM di Kota Balikpapan

3. Skor Survei Kepuasan Masyarakat

Target IKU Skor Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 85% sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 72% yang terukur atas rata-rata nilai IKM dari layanan 68 perangkat daerah Kota Balikpapan. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 84,71% artinya Sasaran Strategis pada indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 adalah “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.16

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Skor Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 dipengaruhi oleh :

- Pada tahun 2016 terdapat penambahan sampling untuk survei IKM terhadap lokasi pasar, di mana pada tahun 2015 survei IKM lokasi pasar hanya 1 lokasi (Pasar Pandasari). Sedangkan pada tahun 2016 dilakukan survei terhadap 3 lokasi, Pasar Pandasari, Pasar Klandasan dan Pasar Sepinggan, dengan nilai masing-masing sebagai berikut :
 - Pasar Pandasari dengan nilai IKM 48,71
 - Pasar Klandasan dengan nilai IKM 59,99
 - Pasar Sepinggan dengan nilai IKM 53,83
- Dari 259 UPP (Unit Pelayanan Publik) yang disurvei sebanyak 256 masuk dalam kategori baik dan 3 UPP pasar tersebut di atas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan hasil survei 2015 ke 2016.
- Adanya perbaikan metodologi survei juga mempengaruhi hasil penilaian survei IKM tahun 2016. Perubahan metodologi dilakukan dengan melakukan sistem silang terhadap surveyor, di mana surveyor diberi tugas di lokasi yang bukan wilayah kerjanya.
- Opini berupa persepsi ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan OPD masih kurang maksimal.
- Kesigapan dan tindak lanjut OPD dalam memberikan pelayanan publik masih kurang.

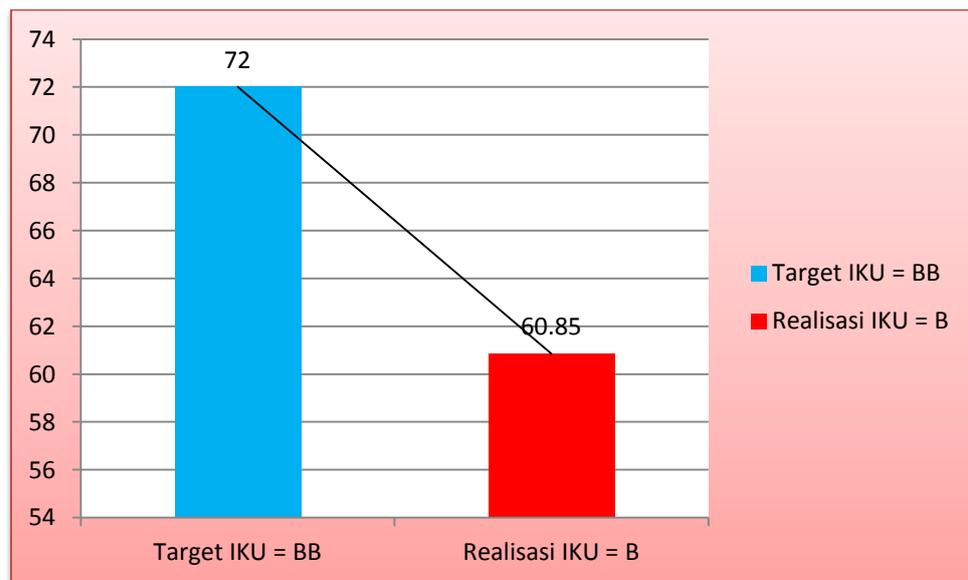
Upaya tindak lanjut perbaikan terhadap tidak tercapainya IKM adalah meningkatkan layanan di setiap OPD.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Target IKU nilai LKjIP yang ditetapkan tahun 2016 adalah target yang akan diukur pada tahun 2016 atas capaian nilai IKU LKjIP tahun 2015

(tahun n-1). Adapun target IKU pada nilai LKjIP sebesar BB < 72 sampai dengan akhir tahun 2015 tercapai realisasi sebesar 60,85 dengan kategori B (skor nilai hasil evaluasi LKjIP tahun 2015).

Jika dibandingkan target IKU nilai LKjIP (BB) dengan asumsi nilai capaian 72, maka capaian realisasi capaian kinerja IKU tersebut adalah sebesar 84,14%. Artinya, capaian Sasaran Strategis pemerintah kota untuk meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) “TIDAK TERCAPAI”. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.17

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan Tahun 2016

Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya IKU tahun 2015 dengan target sebesar 72 (nilai range interval (BB<70-80) dengan realisasi 60,85 merupakan suatu tantangan pemerintah kota untuk meningkatkan kembali pencapaian indikator tersebut pada tahun 2016. Tidak tercapainya Indikator Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan dipengaruhi oleh:

- Kualitas perencanaan, dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang berorientasi terhadap hasil, relevan dan terukur.
- Ketidakselarasan (inkonsistensi) perjanjian kinerja antara level SKPD dengan level Kota, hal ini disebabkan sasaran dan indikator pada perjanjian kinerja belum berorientasi terhadap hasil.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya berorientasi hasil sehingga belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, khususnya di level SKPD.

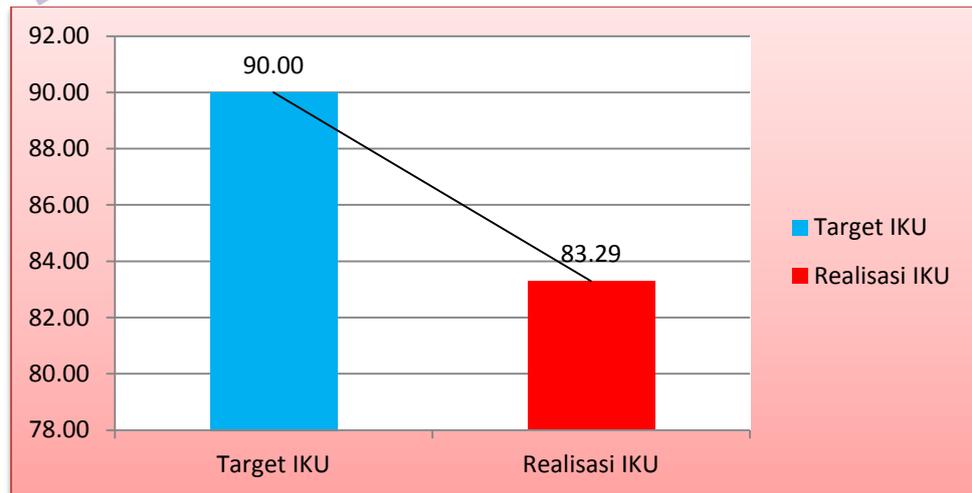
- d. Laporan kinerja yang disusun sampai pada level SKPD masih berisi penekanan pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan capaian kinerjanya dan data yang dikumpulkan belum dapat diandalkan.
- e. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui inspektorat. Hasil evaluasi internal oleh inspektorat perlu dilakukan penyempurnaan kesimpulan, karena simpulan belum sepenuhnya memberikan gambaran kondisi penerapan SAKIP di SKPD dan evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil program.

Upaya tindak lanjut ke depan dalam rangka meningkatkan nilai LKjIP tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PANRB adalah:

- a. Melakukan reviu terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja RPJMD (akan ditindaklanjuti untuk RPJMD periode 2016-2021).
- b. Melakukan Reviu dan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian Kinerja, untuk memastikan kualitas indikator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan memperhatikan kriteria indikator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan cukup. Selanjutnya, diharapkan penetapan kinerja dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV (sudah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu atas IKU kota pada tahun 2016).
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja yang sudah disepakati dan ditandatangani, serta pemantauan terhadap rencana aksi untuk mencapai PK tersebut (akan untuk RPJMD periode 2016-2021).
- d. Mengembangkan Aplikasi Manajemen Kinerja yang dapat memantau perkembangan capaian Kinerja, baik pada tataran SKPD maupun Pemerintah Kota (sedang ditindaklanjuti).
- e. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

5. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Target IKU pada Panjang Jalan dalam Kondisi Baik sebesar 90% dari total panjang jalan 583,84 kilometer sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 83,29%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 84,14% atau 486,28 kilometer panjang jalan dengan kondisi baik artinya capaian Sasaran Strategis pemerintah kota untuk Terwujudnya Infrastruktur Dasar “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.18

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2016

Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya capaian kinerja indikator tersebut, dipengaruhi oleh :

- Keterbatasan anggaran pemerintah kota untuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik.
- Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan jalan berdasarkan tingkat keandalan jalan dalam menerima beban kendaraan.
- Kurang maksimalnya pemeliharaan jalan yang masih ada.

Upaya tindak lanjut ke depan dalam rangka meningkatkan nilai indikator tersebut, antara lain :

- Program/kegiatan peningkatan panjang dalam kondisi baik akan dijadikan prioritas untuk tahun depan, jika anggaran tersedia.
- Meningkatkan pengawasan secara berkala oleh perangkat daerah yang berhubungan langsung terhadap keandalan jalan dalam menerima beban kendaraan.
- Melakukan perbaikan/pemeliharaan jalan secara rutin berdasarkan kondisi jalan yang terukur atas umur teknis jalan.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 63,95 sampai dengan akhir tahun 2016 dan hanya tercapai realisasi sebesar 62,45, atau sebesar 97,65 %, yaitu mengalami sedikit penurunan dibandingkan target.. Artinya capaian Sasaran Strategis pemerintah kota untuk meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dasar “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.20

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016

Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya kinerja indikator tersebut, dipengaruhi oleh Nilai Indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan. Apabila 3 komponen tersebut bernilai rendah maka capaian yang terukur atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi rendah pula dan sebaliknya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 untuk 3 komponen sebagai berikut:

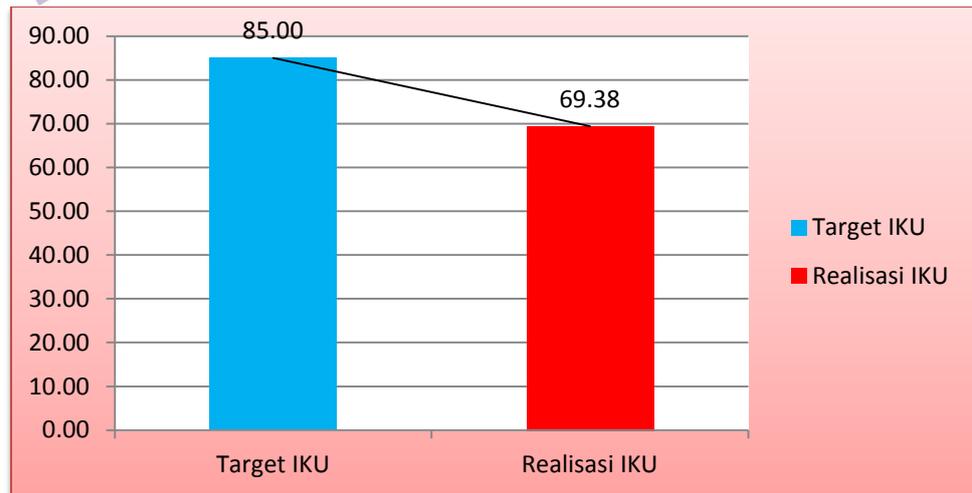
- Nilai Indeks Pencemaran Air sebesar 12,24
- Nilai Indeks Pencemaran Udara sebesar 27,39
- Nilai Indeks Tutupan Hutan sebesar 19,25

Upaya tindak lanjut ke depan dalam rangka meningkatkan nilai indikator tersebut, antara lain :

- Meningkatkan monitoring, pengawasan, dan tindakan terhadap pencemaran lingkungan yaitu air, udara dan tanah.
- Pengetatan pelaksanaan ijin pengupasan lahan.

7. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota

Target IKU pada Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota sebesar 85 sampai dengan akhir tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 69,38 atau sebesar 81,62%, yaitu mengalami sedikit penurunan dibandingkan target.. Artinya capaian indikator dari sasaran strategis pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dasar “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2016. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.20

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota Tahun 2016

Permasalahan atau hambatan tidak tercapainya unsur pelayanan Fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang mendapatkan jumlah nilai 560 berdsarkan nilai rata-rata yang diberikan tiap responden sejumlah 2.383.

Upaya tindak lanjut ke depan dalam rangka meningkatkan nilai indikator tersebut, antara lain :

- Mempertahankan seluruh unsur pelayanan yang telah mencapai nilai rata-rata di atas 3 dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada unsur pelayanan yang masih berada pada angka 2.
- Dalam hal peningkatan unsur fasilitas tempat pemakman umum, agar penyelenggara pelayanan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia sehingga dapat terpelihara dengan baik, memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian pemakaman.
- Agar menyusun standar pelayanan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan.
- Agar mempublikasikan standar pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan.

2.2. Pengukuran Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Tahun 2015.

Perbandingan capaian kinerja instansi tahun 2016 terhadap tahun 2015 tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Target Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir s.d 2016	Satuan	TARGET IKU		REALISASI IKU		CAPAIAN KINERJA	
				2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	1 Angka Melek Huruf	98.49	Persen	98.84	98.68	98.86	99.44	100.02%	100.77%
	2 Rata - Rata Lama Sekolah	10.20	Tahun	10.17	10.41	10.41	10.59	102.36%	101.75%
2	3 Tingkat pengangguran	5.2	Persen	7.90	8.17	5.90	5.45	133.90%	149.91%
3	4 Usia Harapan Hidup	72.30	Tahun	72.26	73.94	73.95	73.96	102.34%	100.03%
4	5 Penurunan Konflik	0	Persen	0	0	0	0	100.00%	100.00%
5	6 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	550,000	Rupiah (jutaan)	428,000	550,000.00	688,239.90	707,293.78	160.80%	128.60%
6	7 Pendapatan Perkapita	67,844,528	Rupiah	61,021,818	67,844,528	120,320,000	130,488,362.89	197.18%	192.33%
	8 PAD	593,881,591,699	Rupiah	539,892,356,090	593,881,591,699	582,744,865,141	560,364,263,457	108%	94%
	9 Inflasi	7.46	Persen	7.38	7.92	6.26	4.13	117.89%	191.77%
	10 Pertumbuhan ekonomi	7.92	Persen	4.60	7.46	3.98	4.25	86.52%	56.97%
7	11 Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial	100	Persen	95.00	85.00	78.80	96.57	82.95%	113.61%
8	12 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85	Skor	80	85	79.36	72.00	99.20%	84.71%
9	13 Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5	Kilowatt	435.5	435.5	432.35	435.50	99.28%	100.00%
10	14 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	39,481,688	Rupiah (jutaan)	32,700,549	39,481,688	39,641,512.20	40,797,639.04	121.23%	103.33%
11	15 Opini BPK	WTP	Nilai Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00%	100.00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir s.d 2016	Satuan	TARGET IKU		REALISASI IKU		CAPAIAN KINERJA	
				2015	2016	2015	2016	2015	2016
12	16 Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	BB<70-80	Nilai Kriteria	72	72	55.19	60.85	76.65%	84.51%
	17 Nilai LPPD	3.0926	Skor	3.2030	3.0926	3.2038	3.3993	100.02%	109.92%
13	18 Panjang jalan dalam Kondisi Baik	100	Persen	80.00	90.00	83.29	83.29	104.11%	92.54%
14	19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.95	Persen	58.58	63.95	58.58	62.45	100.00%	97.65%
	20 Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	85	Persen	80.00	85	84.20	69.38	105.25%	81.62%

Terkait perbandingan hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2016 terhadap capaian kinerja Tahun 2015 di sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Realisasi Indikator Angka Melek Huruf pada tahun 2016 mencapai 99,44% dengan capaian kinerja 100,77% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 98,86% dengan capaian kinerja 100,02%. Peningkatan menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan mutu/kualitas pendidikan bagi masyarakat dalam kemampuan membaca dan menulis.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Realisasi Indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2016 mencapai 10,59 tahun dengan capaian kinerja 101,75% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 10,41 tahun dengan capaian kinerja 102,36%. Peningkatan menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan mutu/kualitas pendidikan bagi masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan dari tingkat dasar, menengah, atas sampai dengan tingkat perguruan tinggi pada strata-1 sampai dengan tingkat strata-3.

3. Tingkat Pengangguran

Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran pada tahun 2016 mencapai 5,45% dengan capaian kinerja 149,91% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 5,90% dengan capaian kinerja 133,90%. Peningkatan menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam menurunkan tingkat pengangguran dengan memperluas lapangan usaha dan lapangan kerja.

4. Usia Harapan Hidup

Realisasi Indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2016 mencapai 73,96 tahun dengan capaian kinerja 100,03% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 73,95 tahun dengan capaian kinerja 102,34%. Peningkatan menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat.

5. Penurunan Konflik

Realisasi Indikator Penurunan Konflik pada tahun 2016 mencapai 0% dengan capaian kinerja 100% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang tetap jika dibandingkan pada tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 0% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam mengelola ketertiban dan keamanan melalui peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan.

6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 mencapai Rp. 707.293.78 dengan capaian kinerja 128,60% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar Rp. 688.239,90 dengan capaian kinerja 160,80%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan PDRB ADHK disektor pertanian.
7. Pendapatan Perkapita
Realisasi Indikator Pendapatan Perkapita pada tahun 2016 mencapai Rp. 130.488.362,89 dengan capaian kinerja 192,33% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar Rp.120.320.000 dengan capaian kinerja 197,18%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan Pendapatan Perkapita penduduk di Kota Balikpapan.
8. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Indikator Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 mencapai Rp.560.364.263.457 dengan capaian kinerja 94% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar Rp. 582.744.865.141 dengan capaian kinerja 108%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pemerintah kota dalam meningkatkan PAD Kota Balikpapan. Penurunan PAD tersebut disebabkan oleh faktor kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan.
9. Inflasi
Realisasi Indikator Inflasi pada tahun 2016 mencapai 4,13% dengan capaian kinerja 191,77% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 6,26% dengan capaian kinerja 117,89%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah kota dalam mengendalikan inflasi di Kota Balikpapan.
10. Pertumbuhan Ekonomi
Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 mencapai 1,56% dengan capaian kinerja 20,91% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan penurunan capaian dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 3,98% dengan capaian kinerja 86,52%. Hal ini menunjukkan kontribusi pada 17 sektor lapangan usaha mengalami penurunan yang sangat signifikan dan memberikan perlambatan terhadap perekonomian di Kota Balikpapan.
11. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial
Realisasi Indikator Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial pada tahun 2016 mencapai 96,57% dengan capaian kinerja 113,61% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator

sebesar 78,80% dengan capaian kinerja 82,95%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi PMKS di Kota Balikpapan.

12. Skor survey kepuasan masyarakat

Realisasi Indikator Skor survey kepuasan masyarakat pada tahun 2016 mencapai 72,00% dengan capaian kinerja 84,71% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 79,36% dengan capaian kinerja 99,20%. Hal ini menunjukkan adanya persepsi ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kota.

13. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Realisasi Indikator Rasio Ketersediaan Daya Listrik pada tahun 2016 mencapai 435.50 Kilowatt dengan capaian kinerja 100% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar 432,35 Kilowatt dengan capaian kinerja 99,28%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Kota Balikpapan.

14. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Realisasi Indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2016 mencapai Rp.40.797.639,04 (dalam juta) dengan capaian kinerja 103,33% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi Indikator sebesar Rp.39.641.512,20 (dalam juta) dengan capaian kinerja 121,23%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam mengembangkan investasi di sektor industri. Hal yang dikembangkan adalah kawasan Industri KIK dan investasi usaha perdagangan yang tersebar di kota Balikpapan.

15. Opini BPK

Realisasi Indikator Opini BPK pada tahun 2016 mencapai WTP sama dengan capaian tahun 2015 dan capaian kinerja yang sama yaitu 100% terhadap target yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Realisasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2015 mencapai 60,85 (kategori B<60-70). Hal ini menunjukkan pemerintah kota berupaya selalu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Balikpapan.

17. Nilai LPPD

Realisasi Indikator Nilai LPPD pada akhir tahun 2015 mencapai 3.3993 (kategori Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan pemerintah kota berhasil untuk meningkatkan keterukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bersumber dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan tahun 2011-2016.

18. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Realisasi Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik pada akhir tahun 2016 mencapai 83,29% dari total panjang jalan 583,84 kilometer dengan capaian kinerja 93,54% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang tetap untuk kondisi jalan yang baik ditahun 2015. Sehubungan hal tersebut pemerintah kota terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur jalan sebagai bentuk pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat pengguna akses jalan.

19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 mencapai 62,45% dengan capaian kinerja 97,65% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi sebesar 58,58%. Terakit atas peningkatan capaian realisasi tahun 2016 menunjukkan keberhasilan pemerintah kota mengelola dan mengantisipasi pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan tutupan hutan.

20. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota

Realisasi Indikator Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota pada tahun 2016 mencapai 69,38% dengan capaian kinerja 81,62% terhadap target yang diperjanjikan, hal capaian tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2015 dengan realisasi sebesar 84,20%. Terakit atas penurunan capaian realisasi tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan atas persepsi masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota. Sejalan hal tersebut, pemerintah kota bersama instansi terkait melakukan peningkatan kebersihan dan keindahan pada tahun berikutnya.

2.3. Pengukuran Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2016 Terhadap Target RPJMD Tahun 2011-2016 Kota Balikpapan.

Perbandingan capaian kinerja instansi tahun 2016 terhadap tahun 2015 tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Rasio dan Capaian Rata-Rata IKU Terhadap Target RPJMD Tahun 2011-2016 Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir s.d 2016	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun					Rasio Realisasi Terhadap Target RPJMD 2011-2016 (%)					Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
1	1. Angka Melek Huruf	98.49	Persen	98.78	98.95	99.95	98.86	99.44	100.29	100.47	101.48	100.38	100.97	100.72
	2. Rata - Rata Lama Sekolah	10.20	Tahun	10.28	10.46	10.41	10.41	10.59	100.78	102.55	102.06	102.06	103.84	102.26
2	3. Tingkat pengangguran	5.2	Persen	5.86	5.09	5.00	5.90	5.45	112.69	97.88	96.15	113.46	104.81	105.00
3	4. Usia Harapan Hidup	72.30	Tahun	72.39	72.30	73.94	73.95	73.96	100.12	100.00	102.27	102.28	102.30	101.39
4	5. Penurunan Konflik	0	Persen	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	550	Rupiah (Milyar)	633.69	649.42	669.26	688.24	707.29	115.22	118.08	121.68	125.13	128.60	121.74
6	7. Pendapatan Perkapita	67.84	Rupiah (Juta)	100.63	108	118	120	130.49	148.32	159.44	174.45	177.35	192.33	170.38
	8. PAD	593,882	Rupiah (Juta)	340,503	470,466	450,421	582,745	560,364	57.34	79.22	75.84	98.12	94.36	80.98
	9. Inflasi	7.46	Persen	6.41	8.56	7.43	6.26	4.13	85.92	114.75	99.60	83.91	55.36	87.91
	10. Pertumbuhan ekonomi	7.92	Persen	8.66	9.03	9.41	3.98	1.56	109.34	114.02	118.81	50.25	19.70	82.42
7	11. Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial	100	Persen	90.00	89.25	26.78	78.80	96.57	90.00	89.25	26.78	78.80	96.57	76.28
8	12. Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85	Skor	73	75.71	76.73	79.36	72.00	85.88	89.07	90.27	93.36	84.71	88.66
9	13. Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5	Kilowatt	178.67	178.67	178.67	432.35	435.50	41.03	41.03	41.03	99.28	100.00	64.47
10	14. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	39,482	Rupiah (jutaan)	23,350.00	34,220.00	39,481.69	39,641.51	40,797.64	59.14	86.67	100.00	100.40	103.33	89.91

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir s.d 2016	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun					Rasio Realisasi Terhadap Target RPJMD 2011-2016 (%)					Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
11	15. Opini BPK	WTP	Nilai Kriteria	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	16. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	BB<70-80	Nilai Kriteria	40	55	58.75	60.85	60.85	64.52	88.71	81.60	84.51	84.51	79.20
	17. Nilai LPPD	3.0926	Skor	2.8486	3.1278	3.0872	3.2038	3.3993	92.11	101.14	99.83	103.60	109.92	101.32
13	18. Panjang jalan dalam Kondisi Baik	100	Persen	80	80	82.50	83.29	83.29	80.00	80.00	82.50	83.29	83.29	81.82
14	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.95	Persen	0	0	0	58.58	62.45	0.00	0.00	0.00	91.60	97.65	94.63
	20. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	85	Persen	0	0	0	84.20	69.38	0.00	0.00	0.00	99.06	81.62	90.34

Berdasarkan tabel **Rasio dan Capaian Rata-Rata IKU Terhadap Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016** Kota Balikpapan menunjukkan capaian hasil pembangunan pada tiap tahun pelaksanaan APBD berdasarkan 20 IKU yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja Wali Kota. Sehubungan pengukuran rasio dan capaian kinerja rata-rata untuk 20 IKU terhadap RPJMD Kota Balikpapan dideskripsikan sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Target realisasi IKU angka melek huruf pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 98,49%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,29%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,47%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 101,48%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,38%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,97%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Angka Melek Huruf memberikan pernyataan bahwa pembangunan kualitas/mutu pendidikan pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” atau MELAMPAUI dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 100,72%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan wajib bidang pendidikan secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas/mutu pendidikan di Kota Balikpapan. Interpretasi atas tercapainya target indikator adalah bahwa tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Target realisasi IKU Rata-rata Lama Sekolah pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 10,20%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,78%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 102,55%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 102,06%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 102,06%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 103,84%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Angka Melek Huruf memberikan pernyataan bahwa pembangunan kualitas/mutu pendidikan pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” atau

MELAMPAUI dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 102,26%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan wajib bidang pendidikan telah secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas/mutu pendidikan di Kota Balikpapan. Interpretasi atas tercapainya target indikator adalah bahwa tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

3. Tingkat Pengangguran

Target realisasi IKU Tingkat Pengangguran pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 5,2%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 112,69%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 97,88%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 96,15%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 113,46%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 104,81%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Tingkat Pengangguran memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang ketenaga kerjaan dalam usaha mengembangkan lapangan usaha dan lapangan kerja pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” atau MELAMPAUI dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 105,00%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan wajib bidang ketenagakerjaan telah secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menurunkan tingkat pengangguran melalui pengembangan kewirausahaan dan menjalin kemitraan pada perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan. Interpretasi atas tercapainya target indikator adalah semakin rendahnya tingkat pengangguran, atau semakin sedikitnya jumlah penganggur akan meningkatkan pengeluaran konsumen yang mengakibatkan naiknya penjualan sektor retail yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan.

4. Usia Harapan Hidup

Target realisasi IKU Usia Harapan Hidup pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 72,30%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,12%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,00%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 102,27%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 102,28%.

- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 102,30%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Tingkat Pengangguran memberikan pernyataan bahwa pembangunan status kesehatan masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” atau MELAMPAUI dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 101,39%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan pelayanan wajib dasar bidang kesehatan telah secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik di Kota Balikpapan. Interpretasi atas tercapainya indikator tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

5. Penurunan Konflik

Target realisasi IKU Penurunan Konflik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 0%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Penurunan Konflik memberikan pernyataan bahwa pembangunan ketertiban dan keamanan pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 100%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama perangkat daerah telah menjalankan urusan pelayanan umum Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah secara maksimal dalam menjaga dan memelihara serta menghadirkan ketertiban dan keamanan di Kota Balikpapan.

6. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Target realisasi IKU Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2011-2016 sebesar Rp.550 Milyar, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 115,22%.

- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 118,08%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 121,68%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 125,13%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 128,60%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB memberikan pernyataan bahwa pembangunan ekonomi pada lapangan usaha pertanian pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” atau MELAMPAUI dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 170,38%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan pelayanan pilihan yaitu pertanian telah secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengungkit pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian di Kota Balikpapan.

7. Pendapatan Perkapita

Target realisasi IKU Pendapatan Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar Rp. 550 Milyar, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 148,32%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 159,44%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 174,45%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 177,35%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 192,33%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Pendapatan Perkapita memberikan pernyataan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” atau MELAMPAUI dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 170,38%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan wajib yaitu pemerintahan umum telah secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan perkapita di Kota Balikpapan.

8. Pendapatan Asli Daerah

Target realisasi IKU Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar Rp. 593.881.591.699, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 57,34%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 79,22%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 75,84%.

- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 98,12%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 94,36%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Pendapatan Perkapita memberikan pernyataan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

Tercapainya indikator tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 80,98%. Terkait dengan capaian rata-rata tersebut pemerintah kota bersama organisasi perangkat daerah telah menjalankan urusan wajib yaitu pemerintahan umum. perlu memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Balikpapan.

9. Inflasi

Target realisasi IKU Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 7,46%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 85,92%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 114,75%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 99,60%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 83,91%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 55,36%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Inflasi memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang ekonomi untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun. Kurang tercapainya IKU tersebut terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 87,91. Sejalan dengan kurang tercapainya indikator tersebut karena kurang maksimalnya monitoring, pengawasan, dan operasi terhadap distribusi harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga pada pasar dan perdagangan pada umumnya, sehingga inflasi di Kota Balikpapan pada 4 tahun pelaksanaan RPJMD yaitu di tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016. Sebagai upaya tindaklanjut adalah 1) melakukan peningkatan sistem yang mampu memberikan informasi up to date harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga; 2) mengendalikan pasokan atau distribusi kebutuhan pokok yang di konsumsi rumah tangga; dan 3) melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap harga kebutuhan pokok yang berkembang pada perdagangan diseluruh Kota Balikpapan.

10. Pertumbuhan Ekonomi

Target realisasi IKU Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 7,92%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 109,34%.

- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 114,02%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 118,81%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 50,25%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 19,70%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Pertumbuhan Ekonomi memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun. Ketercapaian didasarkan atas rasio perbandingan realisasi tahun 2012, tahun 2013 dan 2014. Namun ketercapaian indikator tersebut kurang maksimal berdasarkan nilai capaian rata-rata indikator sebesar 82,42%. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan kurang mencapai target RPJMD. Hal ini dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2 tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan turunnya kontribusi di beberapa sektor lapangan usaha seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan perhotelan dan sektor konstruksi.

11. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial

Target realisasi IKU Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 100%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 90,00%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 89,25%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 26,78%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 78,80%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 96,57%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi PMKS pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan, yang terukur atas nilai capaian rata-rata indikator sebesar 76,28% selama masa jabatan 5 tahun. Kurang tercapainya indikator Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dipengaruhi jumlah ketersediaan dana bantuan sosial kurang mencukupi atau memadai terhadap jumlah PMKS yang membutuhkan bantuan sosial. Adapun upaya tindak lanjut antara lain mengembangkan filterisasi kelayakan dan efektivitas sasaran pemberian bantuan sosial pada PMKS.

12. Skor survey kepuasan masyarakat

Target realisasi IKU Skor Survey Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 85%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 85,88%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 89,07%.

- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 90,27%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 93,36%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 84,71%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Skor Survey Kepuasan Masyarakat memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pemerintahan umum pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” selama masa jabatan 5 tahun. Kurang tercapainya indikator tersebut dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang kurang puas atas hasil kinerja layanan perangkat daerah dan pemerintah Kota Balikpapan.

13. Rasio Ketersediaan Listrik

Target realisasi IKU Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 435,5 kilowatt, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 41,03%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 41,03%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 41,03%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 99,28%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Rasio Ketersediaan Listrik memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang kelistrikan untuk meningkatkan ketersediaan listrik bagi masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

14. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Target realisasi IKU Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar Rp. 39.481.688, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 59,14%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 86,47%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,00%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100,40%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 103,33%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang kelistrikan untuk meningkatkan ketersediaan listrik bagi masyarakat pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

15. Opini BPK

Target realisasi IKU Opini BPK Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah WTP, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 100%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada indikator Opini BPK memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pemerintahan untuk memperoleh Opini WTP pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target realisasi IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap PDRB di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 72 (nilai kriteria BB), berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 64,52%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 88,71%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 81,60%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 76,65%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 84,51%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pemerinatahan untuk meningkatkan pencapaian skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kriteria BB pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

17. Nilai LPPD

Target realisasi IKU Nilai LPPD di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 3.0962, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 92,11%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 101,14%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 99,83%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 103,60%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 109,21%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada Nilai LPPD memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pemerintahan untuk meningkatkan pencapaian skor LPPD dengan kriteria 10 besar pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-

2016 adalah “TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

18. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Target realisasi IKU Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 100%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2012 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 80,00%.
- Tahun 2013 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 80,00%.
- Tahun 2014 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 82,50%.
- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 83,29%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 83,29%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pekerjaan umum pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target realisasi IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 63,95%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 91,60%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 97,65%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pekerjaan umum pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

20. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota

Target realisasi IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebesar 85%, berdasarkan perhitungan rasio capaian realisasi pada :

- Tahun 2015 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 91,60%.
- Tahun 2016 target indikator RPJMD tercapai dengan angka rasio mencapai 97,65%.

Berdasarkan nilai persentase realisasi pada Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota memberikan pernyataan bahwa pembangunan dibidang pekerjaan umum pada akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah “KURANG TERCAPAI” dari target yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan selama masa jabatan 5 tahun.

2.4. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Kota Balikpapan Sampai dengan Tahun 2016 Terhadap Standar Nasional

Berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2012-2016 pada 20 indikator yang diperjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan, pada sub bab ini capaian dari indikator tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian standar nasional. Dari 20 Indikator tersebut yang dapat dibandingkan dengan capaian 9 standar nasional. Adapun perbandingan capaian menurut indikator sebagai berikut.

1. Indikator Angka Melek Huruf

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Angka Melek Huruf Kota Balikpapan mencapai 99,44% sedangkan capaian Nasional sebesar 95,38%. Artinya capaian Indikator Angka Melek Huruf di Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Angka Melek Huruf mencapai 1,04.

2. Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 10,59 tahun sedangkan capaian nasional sebesar 8,35 tahun. Artinya capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah di Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 1,27.

3. Indikator Tingkat Pengangguran

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Tingkat Pengangguran Kota Balikpapan mencapai 5,45% sedangkan capaian Nasional sebesar 7,02%. Artinya capaian Indikator Tingkat Pengangguran di Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Tingkat Pengangguran mencapai 1,29.

4. Indikator Usia Harapan Hidup

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2015, untuk capaian Indikator Usia Harapan Hidup Kota Balikpapan mencapai 73,95 tahun sedangkan capaian Nasional sebesar 70,8 tahun. Artinya capaian Indikator Usia Harapan Hidup di Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Usia Harapan Hidup mencapai 1,04.

5. Indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2014, untuk capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Balikpapan mencapai Rp. 669,26 Milyar tahun sedangkan capaian Nasional sebesar Rp. 861.259,2 Milyar. Artinya capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB di Kota Balikpapan lebih rendah dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB mencapai 0,0008.

6. Indikator Pendapatan Perkapita

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2014, untuk capaian Indikator Pendapatan Perkapita terhadap PDRB Kota Balikpapan mencapai 120 juta per tahun sedangkan capaian Nasional sebesar 45,18 juta per tahun. Artinya capaian Indikator Pendapatan Perkapita di Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian

Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Pendapatan Perkapita terhadap PDRB mencapai 2,65.

7. Indikator Inflasi

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Inflasi Kota Balikpapan mencapai 4,13 (year on year) sedangkan capaian Nasional sebesar 3,53 (year on year). Artinya capaian Indikator Inflasi di Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Inflasi terhadap PDRB mencapai 1,17.

8. Indikator Pertumbuhan ekonomi (berdasarkan PDRB Atas Dasar Konstan)

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,25 sedangkan capaian Nasional sebesar 5,2. Artinya capaian Indikator Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan lebih rendah dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Inflasi terhadap PDRB mencapai 0,82.

9. Indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan PDRB Atas Dasar Konstan)

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2014, untuk capaian Indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai Rp. 394.82 Milyar sedangkan capaian Nasional sebesar Rp. 2.103.718.5 Milyar. Artinya capaian Indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Balikpapan lebih rendah dari capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Inflasi terhadap PDRB mencapai 0,0002.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang diukur atas realisasi terhadap APBD Kota Balikpapan tahun 2016. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sekaligus pencapaian target kinerja yang ada dalam RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan tahun 2016 (setelah perubahan), maka realisasi APBD Kota Balikpapan tahun 2016 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	2.234.750.897.296,00	1.993.392.160.506,00	89,20
Belanja	2.459.654.377.868,00	2.115.731.275.788,00	86,02
Pembiayaan Penerimaan	227.891.480.572,00	227.891.480.572,00	100,00
Pembiayaan Pengeluaran	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Secara umum, realisasi APBD Kota Balikpapan tahun 2016, baik komponen pendapatan, komponen belanja, komponen pembiayaan penerimaan dan komponen pembiayaan pengeluaran cukup bagus, yaitu berkisar antara 86,02 % - 100,00 %, atau rata-rata 93,81 %. Jika dilihat per komponen APBD, pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2015, yaitu sekitar 10,8 % atau sebesar Rp 241.358.736.790,00. Kondisi ini cukup berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja atau RPJMD Kota Balikpapan.

Adapun rincian pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2016 setelah perubahan (sebelum dilakukan audit oleh BPKRI) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	PAD	555.970.991.413,11	560.364.263.457,29	100,79
2	Dana Perimbangan	1.265.362.336.883,11	1.066.561.649.134,00	84,29
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	413.417.569.000,00	366.466.247.915,00	88,64
	JUMLAH	2.234.750.897.296,11	1.993.392.160.506,29	89,20

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel pendapatan di atas, jika dilihat pada komponen pendapatan, dana perimbangan (DBH) tahun 2016 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2015, yaitu sekitar 15,71 %, demikian juga lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 11,36 %. Dengan demikian, jika dilihat secara keseluruhan, maka pendapatan tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 10,80 %.

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan

Tahun 2011-2016

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan
2011	200.000.000.000,00	237.029.073.666,77	1.804.343.010.488,77
2012	290.007.283.203,00	352.034.256.557,17	1.647.132.469.666,19
2013	354.840.272.692,00	470.465.949.932,97	2.214.991.437.841,00
2014	638.630.681.123,00	729.037.647.063,32	2.474.995.562.245,32
2015	539.892.356.090,00	582.744.865.141,84	2.529.001.945.784,00
2016	555.970.991.413,00	560.364.263.457,29	1.993.392.160.506,29

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Pendapatan asli daerah tahun 2016 tidak mengalami penurunan, bahkan relatif naik sedikit, namun pendapatan secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun

2015 karena dipengaruhi oleh turunnya dana perimbangan dan pendapatan daerah lain yang sah.

Realisasi perkembangan dana perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Tahun 2011-2016

Tahun	Perimbangan	Pendapatan	Proporsi Terhadap Pendapatan
2011	1.151.703.793.532,-	1.804.343.010.488,77	63.8%
2012	1.074.521.018.050,00	1.647.132.469.666,19	134.0%
2013	1.173.881.648.321,00	2.214.991.437.841,00	109.3%
2014	2.635.068.224.864,00	2.474.995.562.245,32	106,47%
2015	1.430.910.142.069,00	2.233.750.843.885,84	88.33%
2016	1.066.561.649.134,00	1.993.392.160.506,29	53,51%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Berikut adalah target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	926.068.788.360,00	852.431.100.615,53	92,05
Belanja Langsung	1.533.573.589.508,00	1.263.300.175.173,30	82,38
TOTAL	2.459.654.377.868,00	2.115.731.275.788,83	86,02

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Realisasi perkembangan Belanja Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

Tahun	Belanja Tidak Langsung	(%)	Belanja Langsung	(%)
2011	665.975.045.902,92	90.7	861.457.202.954,85	80
2012	636.400.738.757,38	95.4	1.035.447.137.559,59	89.5
2013	734.517.519.834,65	88.4	1.686.329.924.246,29	72.2
2014	783.390.898.940,53	91.6	1.716.199.878.941,62	74.1
2015	990.651.523.663,37	91.89	1.916.938.797.113,18	81.45
2016	852.431.100.615,53	92,05	1.263.300.175.173,30	82,38

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Jika dilihat pada tabel di atas, maka komponen belanja langsung tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar Rp 653.638.621.940,00 atau sebesar 34,10 %. Hal ini cukup berpengaruh terhadap capaian target kinerja tahun 2016 yang sudah dijelaskan pada sub bab capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan di atas.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2016, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 70 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2016

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Instansi Penerima	Keterangan
1	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Pariwisata Kategori Kota	Pemerintah Prov Kaltim	Disporabudpar	HUT Ke-59 PROV KALTIM
2	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Pemerintahan Setda	HUT Ke-59 PROV KALTIM
3	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan Kategori Kota	Pemerintah Prov Kaltim	Disdukcapil	HUT Ke-59 PROV KALTIM
4	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Industri	Pemerintah Prov Kaltim	Diperindagkop	HUT Ke-59 PROV KALTIM
5	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah	Pemerintah Prov Kaltim	BPMP2T	HUT Ke-59 PROV KALTIM
6	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan	Pemerintah Prov Kaltim	Disdik	HUT Ke-59 PROV KALTIM
7	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Kesehatan	Pemerintah Prov Kaltim	DKK	HUT Ke-59 PROV KALTIM
8	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Hukum dan HAM	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Hukum Setda	HUT Ke-59 PROV KALTIM
9	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemerintah Prov Kaltim	Inspektorat	HUT Ke-59 PROV KALTIM
10	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	Pemerintah Prov Kaltim	BLH	HUT Ke-59 PROV KALTIM
11	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Pemerintah Prov Kaltim	Bappeda	HUT Ke-59 PROV KALTIM
12	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan	Pemerintah Prov Kaltim	DPKP	HUT Ke-59 PROV KALTIM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Instansi Penerima	Keterangan
		Hortikultura			
13	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Pemerintah Prov Kaltim	BNK	HUT Ke-59 PROV KALTIM
14	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan Wahana Tata Nugraha	Pemerintah Prov Kaltim	Dishub	HUT Ke-59 PROV KALTIM
15	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Kwartir Cabang Gerakan Pramuka	Pemerintah Prov Kaltim	Kwarcab Kota Balikpapan	HUT Ke-59 PROV KALTIM
16	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemerintah Prov Kaltim	DTKP	HUT Ke-59 PROV KALTIM
17	Provinsi	Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan	Pemerintah Prov Kaltim	Disporabudpar	HUT Ke-59 PROV KALTIM
18	Provinsi	Terbaik II Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Pemerintahan Setda	HUT Ke-59 PROV KALTIM
19	Provinsi	Terbaik II Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Pemerintahan Setda	HUT Ke-59 PROV KALTIM
20	Provinsi	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Prov Kaltim	BPMP2KB	HUT Ke-59 PROV KALTIM
21	Provinsi	Terbaik II Bidang Tata Kelola Kerasipan	Pemerintah Prov Kaltim	Kantor Arsipus	HUT Ke-59 PROV KALTIM
22	Provinsi	Terbaik II Bidang Pembangunan Perpustakaan dan Minat Baca	Pemerintah Prov Kaltim	Kantor Arsipus	HUT Ke-59 PROV KALTIM
23	Provinsi	Terbaik II Bidang pemeringkatan E-Government	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Ortal	HUT Ke-59 PROV KALTIM
24	Provinsi	Terbaik II Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Prov Kaltim	BPKAD	HUT Ke-59 PROV KALTIM
25	Provinsi	Terbaik II Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi	Pemerintah Prov Kaltim	TP PKK	HUT Ke-59 PROV KALTIM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Instansi Penerima	Keterangan
26	Provinsi	Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan	Pemerintah Prov Kaltim	Disnekersos	HUT Ke-59 PROV KALTIM
27	Provinsi	Terbaik III Bidang Keterbukaan Informasi dan Peningkatan PPID	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian Humas dan Protokol	HUT Ke-59 PROV KALTIM
28	Provinsi	Terbaik III Bidang Pembangunan Keolahragaan	Pemerintah Prov Kaltim	Disporabudpar	HUT Ke-59 PROV KALTIM
29	Provinsi	Terbaik III Bidang Kependudukan dan KB	Pemerintah Prov Kaltim	Disdukcapil	HUT Ke-59 PROV KALTIM
30	Provinsi	Terbaik III Bidang Perdagangan	Pemerintah Prov Kaltim	Disperindagkop	HUT Ke-59 PROV KALTIM
31	Provinsi	Terbaik III Bidang Pelayanan Terpadu	Pemerintah Prov Kaltim	BPMP2T	HUT Ke-59 PROV KALTIM
32	Provinsi	Terbaik III bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Pemerintah Prov Kaltim	Disdik	HUT Ke-59 PROV KALTIM
33	Nasional	Rekor Makan Buah Naga Terbanyak (5119) buah	LEPRID	Kota Balikpapan	HUT ke-119 Kota Balikpapan
34	Nasional	Rekor Penghargaan Nasional dan Internasional Selama 5 Tahun Terakhir (2011-2015)	LEPRID	Kota Balikpapan	HUT ke-119 Kota Balikpapan
35	Nasional	Jawa Pos Grup Award 2016 Untuk 10 Kepala Daerah Terbaik Versi Jawa Pos Grup	Jawa Pos Grup	Walikota Balikpapan	
36	Regional Kaltim	Unit Kerja Pelayanan Publik Kategori Kepatuhan Tinggi dalam Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur	Disdukcapil	Kunjungan ORI ke Kantor Wali Kota Balikpapan
37	Regional Kaltim	Unit Kerja Pelayanan Publik Kategori Kepatuhan Tinggi dalam Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur	BPMP2T	Kunjungan ORI ke Kantor Wali Kota Balikpapan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Instansi Penerima	Keterangan
38	Nasional	Penghargaan atas Partisipasi Pemda dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran untuk Kota Sedang	Kemendagri	BPBD	HUT ke-97 Damkar di Semarang
39	Nasional	10 besar LPPD Terbaik	Kemendagri	Pemerintah Kota Balikpapan	Peringatan Hari Otonomi Daerah XX di Kulon Progo DIY
40	Regional Kaltim	Penghargaan atas Keberhasilan dalam Membina dan Mengembangkan UKS di Wilayahnya	Gubernur Kalimantan Timur	Walikota Balikpapan	Peringatan Hardiknas Tingkat Prov Kaltim
41	Nasional	Peringkat I Pembina K3	Kemenaker	Walikota Balikpapan	K3 Award
42	Nasional	Pembina Program Pencegahan & Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja Tahun 2016	Kemenaker	Walikota Balikpapan	K3 Award
43	Nasional	Special Mention Kategori Pemerintah Kota	Kementerian & profesional	Kota Balikpapan	Indonesia Digital Economy Award 2016
44		Opini WTP	BPK Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan	Penyerahan Hasil Audit BPK & KAP atas LRA Kota Balikpapan TA 2015
45	Nasional	Top 35 SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik) Indonesia	Kemen PAN & RB	UPT Manggar	Seremoni Pengumuman TOP 35 SINOVIK oleh Wapres
46	Nasional	Terbaik II Nasional Anugerah Nawacita Legislasi 2016 (Perda KIBLA)	Kemenkumham	DKK, Bagian Hukum	Acara Rakernis Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham
47	Nasional	Adipura Paripurna	Kementerian LH & Kehutanan	Kota Balikpapan	Peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia
48	Nasional		Kementerian LH & Kehutanan	Kota Balikpapan	Peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Instansi Penerima	Keterangan
		Peringkat II Nirwasita Tantra Award 2016			
49	Nasional	Pakarti Utama II Tk Nasional Posyandu	PKK Pusat/Kemendagri	Posyandu Damai Bersama, Kec. Balsei	Peringatan Harganas XXIII Tahun 2016
50	Nasional	TPID Inovatif 2015 Tk. Kabupaten/kota	Pemerintah Pusat	TPID Kota Balikpapan	Rakornas VII TPID 2016
51	Nasional	Kota Terbaik Koridor Kalimantan	Frontier Consulting Group & Tempo Media Grup	Kota Balikpapan	Indonesia Attractiveness Award 2016
52	Nasional	Kota Potensial Kategori Infrastruktur	Frontier Consulting Group & Tempo Media Grup	Kota Balikpapan	Indonesia Attractiveness Award 2016
53	Nasional	Top Kota Tiap Koridor	Frontier Consulting Group & Tempo Media Grup	Kota Balikpapan	Indonesia Attractiveness Award 2016
54	Nasional	Kalimantan PR Indonesia Media Relation Award and Summit (KALPRIMAS) 2016	Majalah PR Indonesia & PT Isentia Jakarta	Bagian Humas Pemerintah Kota Balikpapan	Jambore PR dan Media Indonesia (JAMMPIRO) #2
55	Nasional	Bhumandala Award / SIMTARU	Badan Informasi Geospasial	Bappeda Kota Balikpapan	
56	Nasional	Kawastara Pawitra	Kemendikbud/ LPPKS	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	
57	Provinsi	BNN Award	BNN	Kepala Daerah berprestasi dalam pemberantasan narkoba	
58	Nasional	Sanipura Award	Kementerian PMK	Walikota Balikpapan	City Sanitatin Summit XVI di NAD
59	Nasional	Ki Hajar Award	Kemendikbud	Walikota Balikpapan	
60	Nasional	Natamukti Satria	Internarional Council for Small Bussines	Disperindag	ICSB Indonesia City Award 2016
61	Nasional	Peringkat III Penghargaan Penanaman Pohon Tahun 2015	Kementerian LHK	Wali Kota Balikpapan	Hari Menanam Pohon Indonesia 2016 di Tuban Jawa timur
62	Nasional	Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2016	Kementerian Perhubungan dan Adira Insurance	Dinas Perhubungan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Instansi Penerima	Keterangan
63	Nasional	Regional Marketeers Award 2016	Marketeers dan Indonesia Marketing Association	Wali Kota Balikpapan	RMA Award 2016
64	Nasional	Gold Champions WOW Service Excellent Award	Marketeers dan Indonesia Marketing Association	Dishub	RMA Award 2016
65	Nasional	Gold Champions WOW Service Excellent Award	Marketeers dan Indonesia Marketing Association	DTKP	RMA Award 2016
66	Nasional	Gold Champions WOW Service Excellent Award	Marketeers dan Indonesia Marketing Association	DKPP	RMA Award 2016
67	Nasional	Gold Champions WOW Service Excellent Award	Marketeers dan Indonesia Marketing Association	Satpol PP	RMA Award 2016
68	Nasional	Opini WTP untuk LKPD tahun 2015	Kementerian Keuangan RI	Pemerintah Kota Balikpapan	
69	Nasional	Kota Peduli Hak Azazi Manusia	Kementerian Hukum dan HAM	Bagian Hukum	
70	Nasional	Penghargaan Program Langit Biru :Terbaik I kategori Kota Besar Evaluasi Kualitas Udar Perkotaan Tahun 2016	Kementerian LHK	Kota Balikpapan	

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2016 terdapat 14 (empat belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Tabel 4.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	Tercapai
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	Tercapai
3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Tercapai
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	Tercapai
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	Tercapai
6.	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	Tercapai
7.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Tercapai
8.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik	Tercapai
9.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	Tercapai

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja
10.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	Tercapai
11	Terlaksananya reformasi birokrasi	Tercapai
12.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Tidak Tercapai
13.	Terwujudnya infrastruktur dasar	Tidak Tercapai
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 14 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan trend meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang merupakan tahun keempat RPJMD.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 menunjukkan kategori baik, akan tetapi terdapat beberapa indikator kinerja yang masih perlu perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan untuk ditingkatkan, yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Skor Survei Kepuasan Masyarakat
4. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan
5. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 15 Januari 2016
WALI KOTA BALIKPAPAN


H. M. RIZAL EFFENDI

PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Angka Melek Huruf	98.86
		2. Rata - Rata Lama Sekolah	10.41
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Tingkat pengangguran	8.17%
3	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	73.94
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1. Penurunan Konflik	0
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	550M
6	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	1. Pendapatan Perkapita	67,844,528
		2. PAD	593,881,591,699
		3. Inflasi	7.92%
		4. Pertumbuhan ekonomi	7.46%
7	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial	85%
8	Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	1. Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85
9	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1. Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5
10	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3941688
11	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1. Opini BPK	WTP
12	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	BB
		2. Nilai LPPD	10 Besar
13	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	1. Panjang jalan dalam Kondisi Baik	90%
14	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.95
		2. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	85

No.	Program	Anggaran
1	Program Pengembangan Tenaga Kependidikan	Rp 281,000,000.00
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 49,472,689,600.00
3	Program Pendidikan Menengah	Rp 35,620,992,000.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

4	Program Pendidikan Non Formal	Rp	10,271,990,400.00
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	10,205,414,650.00
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Rp	1,000,000,000.00
7	Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Rp	2,284,440,000.00
8	Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)	Rp	38,049,818,750.00
9	Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)	Rp	18,980,786,500.00
10	Program BOSDA Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp	20,659,250,500.00
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	10,331,570,000.00
12	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1,267,415,000.00
13	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	2,620,010,000.00
14	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	1,173,600,000.00
15	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp	3,563,495,000.00
16	Program pendidikan politik masyarakat	Rp	3,815,000,000.00
17	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp	93,750,000.00
18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	2,478,994,450.00
19	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Rp	1,467,465,000.00
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rp	470,023,000.00
21	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Rp	1,729,185,000.00
22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	109,935,000.00
23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	290,800,000.00
24	Usaha Pengembangan Potensi BUMD dan Ekonomi Kerakyatan	Rp	284,330,000.00
25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	2,620,010,000.00
26	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Rp	396,231,000.00
27	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	423,149,600.00
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Rp	1,119,107,000.00
29	Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp	78,513,837,750.00
30	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Rp	3,035,000,000.00
31	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	630,000,000.00
32	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	1,679,100,000.00
33	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	5,544,820,250.00
34	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	565,417,000.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

35	Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota	Rp	8,061,082,200.00
36	Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Rp	432,844,900.00
37	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	432,844,900.00
38	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Rp	3,035,000,000.00
39	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	630,000,000.00
40	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	1,679,100,000.00
41	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	5,544,820,250.00
42	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	565,417,000.00
43	Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota	Rp	8,061,082,200.00
44	Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Rp	432,844,900.00
45	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	432,844,900.00
46	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	10,600,000,000.00
47	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	19,127,574,050.00
48	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	423,100,000.00
50	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rp	2,230,000,000.00
51	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	1,208,948,000.00
52	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	4,591,310,000.00
53	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	600,500,000.00
54	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp	1,478,900,000.00
55	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp	12,810,290,900.00
56	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp	5,697,550,200.00
57	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp	544,620,000.00
58	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	5,214,500,000.00
59	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rp	2,669,620,000.00
60	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Rp	10,445,593,000.00
61	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	13,083,803,000.00
62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	127,182,778,484.00
63	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rp	1,800,000,000.00
64	Program pengendalian banjir	Rp	80,198,786,750.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

65	Program Sumber Daya Manusia	Rp	3,694,004,160.00
66	Program Penelitian	Rp	6,686,000,000.00
67	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Rp	603,832,732,392.00
68	Program Pembangunan Peningkatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	114,537,020,020.00
69	Program Operasional Pemeliharaan Ke-PU-an	Rp	11,482,202,500.00
70	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	200,000,000.00
71	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	538,050,000.00
72	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp	500,000,000.00
73	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	180,000,000.00
74	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	1,530,000,000.00
75	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut	Rp	659,727,000.00
76	Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan	Rp	328,970,000.00
77	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota	Rp	1,038,920,000.00
78	Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	3,337,800,000.00
79	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	1,577,209,520.00
80	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan	Rp	79,000,000.00
81	Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	90,000,000.00

Balikpapan, 15 Januari 2016
WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1 Angka Melek Huruf (%)	98.68	99.44	100.77
		2 Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	10.41	10.59	101.75
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	3 Tingkat pengangguran (%)	8.17	5.45	149.91
3	Meningkatnya Status kebebasan masyarakat	4 Usia Harapan Hidup (Tahun)	73.94	73.96	100.03
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	5 Penurunan Konflik (%)			100.00
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	6 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Rp)	550,000.00	707,293.78	128.60
6	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	7 Pendapatan Perkapita (Rp)	67,844,528.00	130,488,362.89	192.33
		8 PAD (Rp)	593,881,591,699	560,364,263,457	94.36
		9 Inflasi (%)	7.92	4.13	191.77
		10 Pertumbuhan ekonomi (%)	7.46	1.56	20.91
7	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	11 Presentase PMKS yang menerima bantuan Sosial (%)	85	96.57	113.61
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan layanan publik	12 Skor Survei Kepuasan Masyarakat (Skor)	85	72	84.71
9	Meningkatnya cakupan layanan penyediaan listrik kepada masyarakat	13 Rasio Ketersediaan daya listrik (Kilowatt)	435.50	435.50	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
10	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	14 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)	39,481,688	40,797,639.04	103.33
11	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	15 Opini BPK (Kategori)	WTP	WTP	100.00
12	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	16 Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (Kategori)	BB	B<60,85	84.51
		17 Nilai LPPD (Skor)	10 Besar	3.3993	109.92
13	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	18 Panjang jalan dalam Kondisi Baik (%)	90	83.92	93.24
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	63.95	62.45	97.65
		20 Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota (Skor)	85.00	69.38	81.62

Balikpapan, Maret 2017
WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Kotak Pos 1111
Balikpapan 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman reviu atas laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Balikpapan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Balikpapan, 24 Maret 2017

Inspektur Kota Balikpapan,

Hj. Dahniar SE. M.AP
NIP. 196311111985112003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

KERTAS KERJA REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.		PERNYATAAN	CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	<input checked="" type="checkbox"/>
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	<input checked="" type="checkbox"/>
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		10. IKU dan IK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>



WALIKOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 180 . 45 . 105 /Org/2015

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Walikota Balikpapan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Balikpapan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : Februari 2015

WALIKOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI

**VISI RPJMD TAHUN 2011-2016
MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI
MENUJU MADINATUL**